



RENSTRA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2025-2029

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

JL. D.I. Panjaitan No.40 Kode Pos 78851 Telp./Fax. (0534) 32253

Website: <http://dinkes.ketapangkab.go.id>

E-mail : dinkes@ketapangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029, yang di dalamnya tertuang tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028 dan tahun 2029 ke depan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksana Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini hendaknya menjadi acuan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Ketapang, 4 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan



dr. FERIA KOWIRA, M.M
NIP. NIP. 19730507 200212 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum	4
Maksud dan Tujuan	9
Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	1
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah.....	1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2
2.1.2 Kelompok Jabatan Fungsional.....	9
2.1.3 Visi, Misi, Moto dan SPM Bidang Kesehatan	11
2.1.4 Sumber Daya Manusia Kesehatan.....	12
2.1.5 Tenaga Kesehatan di Puskesmas.....	14
2.1.6 Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit.....	15
2.1.7 Pembiayaan Kesehatan	16
2.1.8 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.1.8.1 Angka Harapan Hidup	24
2.1.8.2 Angka Kematian Ibu (AKI).....	25
2.1.8.3 Angka Kematian Bayi (AKB)	26
2.1.8.4 Angka Kematian Balita (AKBa).....	27
2.1.8.5 Pelayanan Kehamilan	28
2.1.8.6 Pelayanan Kelahiran.....	30

2.1.8.7 Gizi Buruk.....	31
2.1.8.8 Imunisasi.....	35
2.1.8.9 Posyandu.....	37
2.1.8.10 Angka Kesakitan.....	39
2.1.8.11 Penyakit Tidak Menular.....	44
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	48
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.2.2 Isu Strategis	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI.....	56
Tujuan dan Sasaran Renstra	56
3.1.1 Tujuan.....	56
3.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	56
3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN.....	61
4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan.....	61
4.1.1 Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan.....	62
4.1.2 Program dan Kegiatan Penunjang.....	63
4.2 Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	
.....	122
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	125
4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	125
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	129
BAB V PENUTUP	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Spm Bidang Kesehatan Kabupaten Ketapang	11
Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan Menurut Sumber Anggaran Di Kabupaten Ketapang Tahun 2020 – 2024	19
Tabel 2. 3 Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024	22
Tabel 2. 4 Data Mengenai Cakupan Pelayanan Kesehatan Kehamilan Di Kabupaten Ketapang Pada Tahun 2020 Hingga 2024	29
Tabel 2. 5 Jumlah Kasus Ispa, Hipertensi, Gastritis, Dan Radang Sendi Di Kabupaten Ketapang Pada Tahun 2020 Hingga 2024	45
Tabel 2. 6 Jumlah Kasus Odj Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Ketapang Selama Periode 2020 Hingga 2024	47
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pembangunan.....	49
Tabel 2. 8 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.....	50
Tabel 2. 9 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan.....	53
Tabel 3. 1 Casecading Renstra 2025-2029	58
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	60
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Ketapang	64
Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Ketapang.....	94
Tabel 4. 3 Program Prioritas Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	122
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Kesehatan	125
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Ketapang.....	126
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Ketapang	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan Renstra.....	4
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Ketapang.....	9
Gambar 2. 2 Grafik Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga Per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Ketapang Tahun 2024.....	13
Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan Di Puskesmas	15
Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit.....	16
Gambar 2. 5 Grafik Proporsi Alokasi Anggaran Kesehatan Bersumber Apbd Di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2024.....	17
Gambar 2. 6 Perbandingan Ahh Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Dan Nasional Pada Tahun 2020-2024	24
Gambar 2. 7 Data Aki Per 100.000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Ketapang Selama Tahun 2020–2024.....	25
Gambar 2. 8 Capaian Akb Per 1.000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Ketapang Pada Tahun 2020–2024.....	26
Gambar 2. 9 Gambaran Akba Per 1.000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Ketapang Pada Tahun 2020–2024.....	28
Gambar 2. 10 Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Profesional Di Kabupaten Ketapang Selama Periode 2020–2024.....	30
Gambar 2. 11 Gambaran Persentase Gizi Buruk Balita Di Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024.....	32
Gambar 2. 12 Prevalensi Balita Stunting Di Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 .	33
Gambar 2. 13 Tren Persentase Bayi Dan Balita Yang Menerima Imunisasi Dpt-Hb- Hib3, Polio 4, Dan Campak/Mr Di Kabupaten Ketapang Pada Tahun 2020–2024	36
Gambar 2. 14 Rasio Posyandu Terhadap Bayi Dan Balita Di Kabupaten Ketapang Pada Periode 2020–2024.....	38
Gambar 2. 15 Jumlah Kasus Hiv/Aids Di Kabupaten Ketapang Menunjukkan Tren Kenaikan Selama Periode 2020 Hingga 2024.....	40
Gambar 2. 16 Data Mengenai Jumlah Kasus Dbd Dan Tb Di Kabupaten Ketapang Selama Periode 2020 Hingga 2024.....	41
Gambar 2. 17 Gambaran Jumlah Kasus Diare Yang Ditangani Di Kabupaten Ketapang Selama Periode 2020–2024	43

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan kegiatan, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya maka urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Peraturan yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 tahun 2004. Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Selain dari itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 dan Permenkes Nomor 6 tahun 2024 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 menetapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level

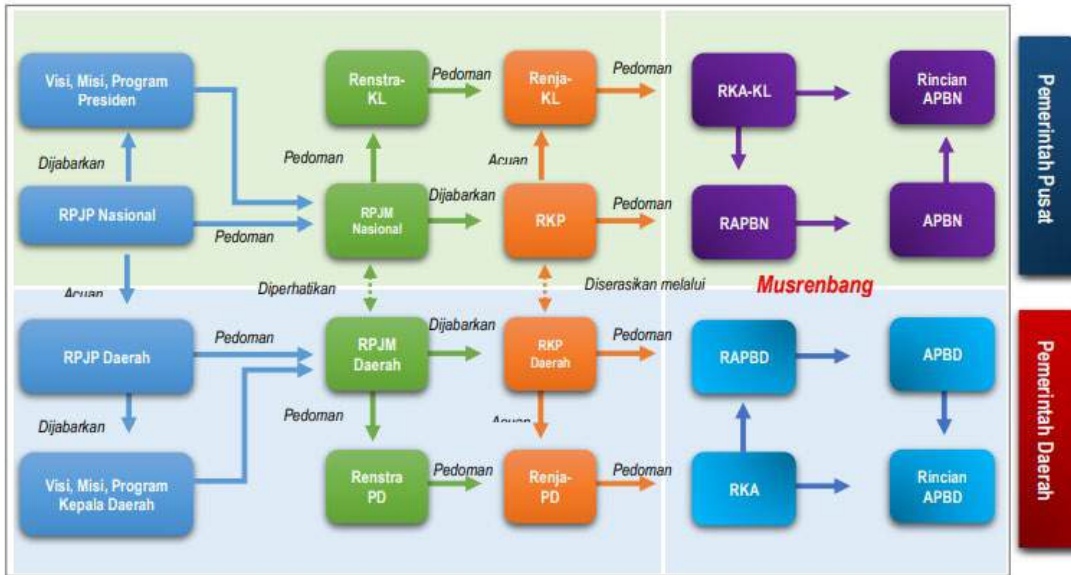
pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri atas perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat, adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama, serta pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka dalam upaya perumusan strategi agar dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal yang sedang berkembang Dinas Kesehatan perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 ini didasarkan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Dalam proses penyusunan renstra Dinas Kesehatan dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan melalui tahap persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan arah yang jelas tentang keterkaitan antar dokumen perencanaan. Hal ini seperti terdapat pada definisi sistem perencanaan pembangunan nasional di dalam regulasi tersebut, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Keterkaitan yang dimandatkan di dalam regulasi tersebut tentang keterkaitan antar jangka perencanaan maupun antara perencanaan pusat dan daerah. Tidak kalah penting, sistem perencanaan tidak hanya menjadi domain pemerintah semata, tetapi juga adanya peran masyarakat. Urgensi keterkaitan antar perencanaan ini semakin jelas dengan merujuk pada tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan antara dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan Renstra

Renstra Perangkat Daerah merupakan turunan RPJMD dan harus dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut melandasi proses penyusunan maupun substansi yang termuat di dalam dokumen ini. Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2025 - 2029 yaitu:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 42).

Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang ini disusun dengan maksud sebagai pedoman seluruh komponen bidang kesehatan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ketapang sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan kesehatan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Renstra bidang kesehatan juga memberikan gambaran kondisi terkini, kesenjangan dan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 adalah:

Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang kedalam tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2025- 2029, yang disertai program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ketapang;

Merumuskan gambaran umum bidang kesehatan dalam upaya identifikasi permasalahan dan isu strategis bidang kesehatan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan kesehatan lima tahun kedepan;

Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan lima tahun kedepan;

Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah serta dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan setiap tahunnya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal dan penyelarasan tugas serta fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan di Pusat dan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengorganisasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Ketapang nomor 42 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan. Berdasarkan peraturan dimaksud, kedudukan dan susunan organisasi Dinas Kesehatan berubah yang semula tipe B menjadi tipe A dengan menambah 1 (satu) bidang baru.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang nomor 42 tahun 2022, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dimaksud Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;

5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dijabarkan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : (a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; (d) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas; (e) Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; (f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Selanjutnya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan pada organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat; (b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan sekretariat; (c) Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset; (d) Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas; (e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, (f) Penyelenggaraan urusan perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan; (g) Pelaporan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas; (h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan; (i) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; dan (j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian dinas dengan rincian tugas sebagai berikut : (a) Menyusun rencana kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian; (b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian; (c) Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan Dinas; (d) Melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan, protokoler, dan perjalanan dinas; (e) Menyiapkan bahan dan mengusulkan kenaikan pangkat, ujian dinas, gaji berkala, cuti, pensiun, dan pemberian penghargaan pegawai; (f) Menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), fasilitasi penyusunan dan penghimpunan dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penilaian prestasi kerja Pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan daftar hadir pegawai; (g) Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, fungsional teknis, dan fungsional umum; (h) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; (i) Menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat; (j) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; (k) Melaksanakan Reformasi Birokrasi; (l) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan (m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan dinas rincian tugas sebagai berikut : (a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan; (c) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan Dinas; (d) Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan Dinas, laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan Dinas dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; (e) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik Dinas; (f) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan (g) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat;

3. Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Kesehatan Masyarakat;
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan kesehatan keluarga, perbaikan gizi dan penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : (a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (b) Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (c) Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (d) Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (e) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (f) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Sumber Daya Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : (a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan; (b) Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan; (c) Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Sumber Daya Kesehatan; (d) Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan; (e) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Sumber Daya Kesehatan; (f) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya dalam melaksanakan urusan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

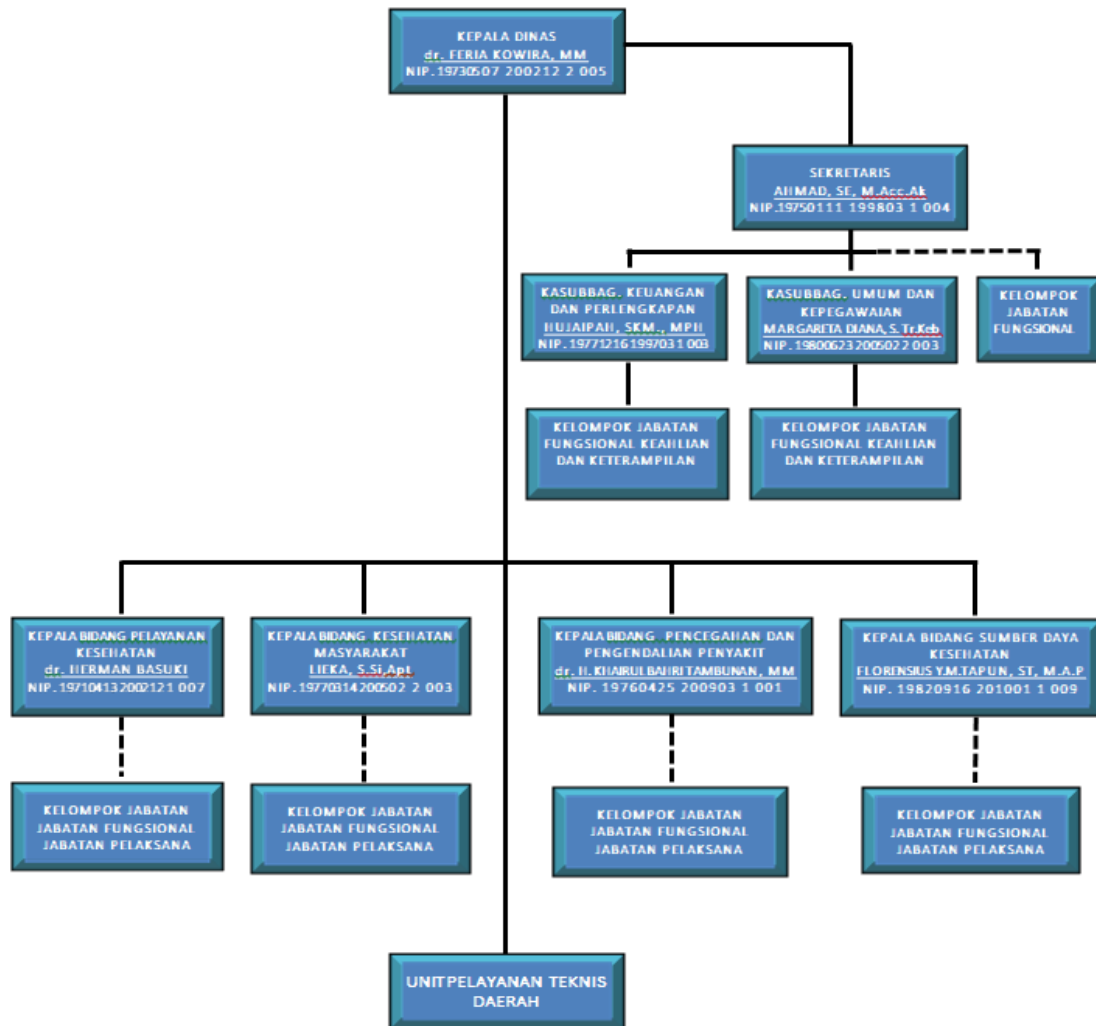
Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mempunyai 3 (tiga) UPTD yaitu :

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang
2. Puskesmas Se Kabupaten Ketapang
3. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Ketapang

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

2.1.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26 disebutkan Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 disebutkan pula bahwa Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 28 dijabarkan pula uraian sebagai berikut :

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 23 terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas dan atau pejabat administrator sesuai bidang tugasnya.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Nomenklatur jabatan subkoordinator dan pembagian tugas diusulkan oleh Kepala Dinas.

Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kemudian pada Pasal 29 dijabarkan uraian sebagai berikut : Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (C), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 23 terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas dan atau pejabat administrator sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Visi, Misi, Moto dan SPM Bidang Kesehatan

Visi dan Misi

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah "Terwujudnya Ketapang Sehat dan Mandiri".

Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang terdiri dari 4 point yaitu :

1. Memantapkan manajemen Kesehatan yang dinamis dan akuntabel
2. Mewujudkan kualitas dan kuantitas pelayanan Kesehatan
3. Mengembangkan kemandirian Masyarakat dalam hidup sehat
4. Meningkatkan system informasi kesehatan

Motto

Motto Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah "Memberikan Pelayanan Secara Profesional dan Akuntabel"

Berikut Layanan pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang :

Email : dinkes@ketapangkab.go.id

Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id/>

Kotak Pengaduan, Pengaduan Offline

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Berikut target SPM bidang Kesehatan Kabupaten Ketapang:

NO	Nama Indikator	Target (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
4	Pelayanan kesehatan balita	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100

Tabel 2. 1 Target SPM bidang Kesehatan Kabupaten Ketapang

2.1.4 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional. Komponen ini memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan. SDMK juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

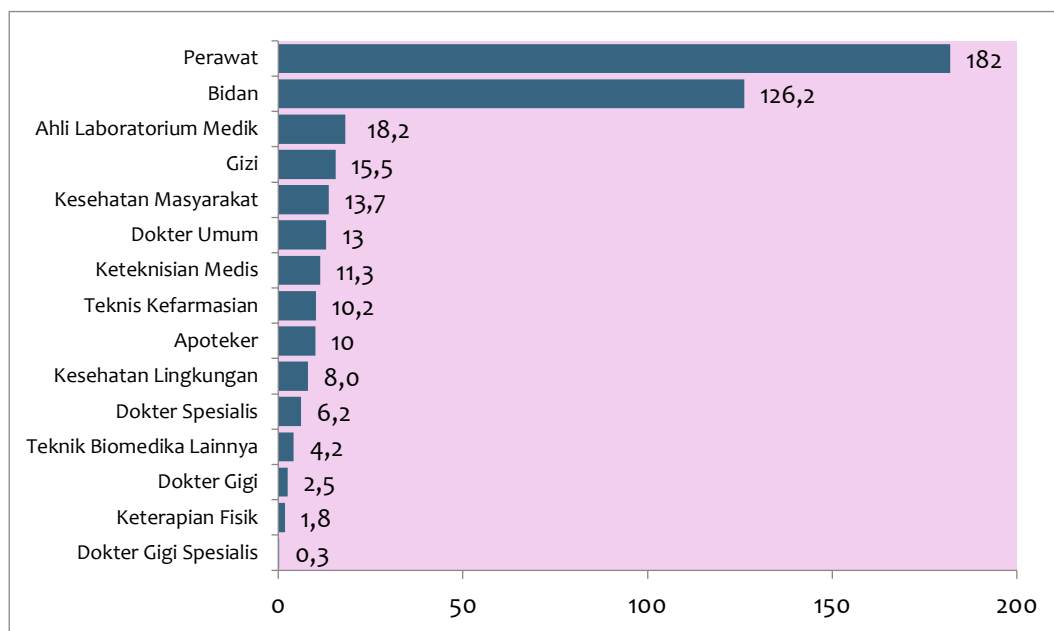
Jumlah tenaga kesehatan tersebut di atas merupakan jumlah tenaga yang bertugas di seluruh unit pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan jaringannya dan sarana pelayanan kesehatan lain). Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.

Adapun yang termasuk tenaga kesehatan itu terdiri dari :

1. Tenaga medis, meliputi dokter dan dokter gigi
2. Tenaga keperawatan, meliputi perawat dan bidan
3. Tenaga kefarmasian, apoteker, meliputi analis farmasi dan asisten apoteker
4. Tenaga kesehatan Masyarakat, meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian
5. Tenaga gizi, meliputi nutrisisionis dan dietisien
6. Tenaga keterampilan fisik, meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara
7. Tenaga keteknisian medis, meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

8. Tenaga ahli laboratorium medik

Rasio tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Ketapang sampai akhir tahun 2024 tergambar pada grafik dibawah ini :



Gambar 2. 2 Grafik Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga per 100.000 penduduk di Kabupaten Ketapang Tahun 2024

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2024, Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dari grafik di atas terlihat rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk terbanyak perawat (182 per 100.000 penduduk) dan bidan (126 per 100.000 penduduk) dan rasio paling kecil adalah Dokter Gigi Spesialis (0,3 per 100.000 penduduk). Besarnya rasio ini selain dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dipengaruhi pula oleh jenis pelayanan kesehatan. Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menyusun rencana kebutuhan dalam penyediaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, hingga pendidikan, latihan dan penyebaran tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari rasio ini dapat diketahui jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang tenaga kesehatan tertentu, karena itu rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan tenaga kesehatan untuk suatu jenis pelayanan kesehatan.

Perlu upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi petugas terutama yang tingkat pendidikannya masih belum sesuai ketentuan yang berlaku sehingga ada jaminan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemampuan teknis tenaga kesehatan khususnya bidan, perawat dan tenaga teknis medis lainnya yang bertugas pada Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Rumah Sakit masih perlu ditingkatkan lagi baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis mengingat mereka adalah tenaga strategis di sarana pelayanan kesehatan dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan tenaga yang ada pada Dinas Kesehatan masih memerlukan peningkatan jenis tenaga sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama untuk jenjang pendidikan D-3, Strata-1 dan Strata-2 dalam bidang kesehatan.

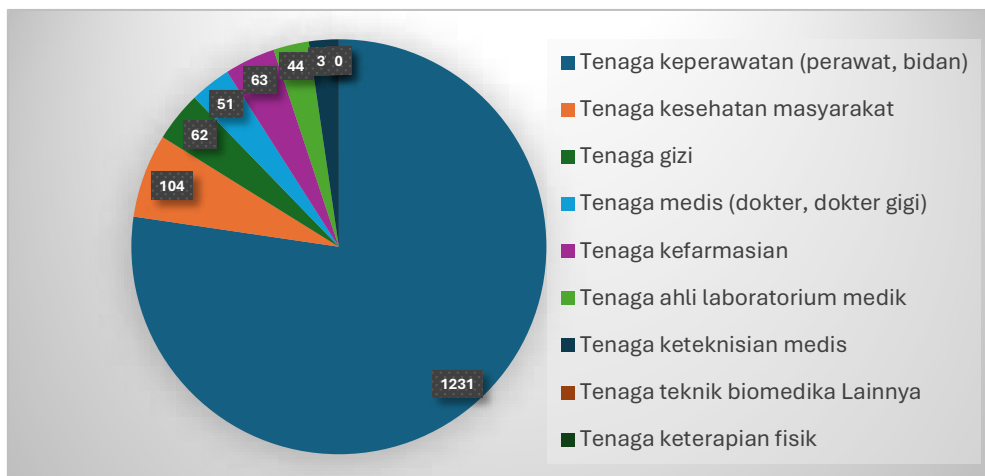
2.1.5 Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dengan demikian, untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.

Situasi tenaga kesehatan di puskesmas hingga tahun 2024 dari segi kuantitas maupun kualitas sudah mulai terpenuhi sesuai dengan usulan dari tiap puskesmas dengan mengisi kebutuhan sumber daya manusianya melalui Aplikasi Renbut. Aplikasi Renbut merupakan aplikasi online yang dikembangkan Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Kebutuhan minimal dan Analisis Beban Kerja (ABK) ditingkat pusat dan daerah.

Namun demikian dari hasil laporan yang diterima dari Bidang Sumber Daya

Kesehatan masih ada beberapa puskesmas yang belum terpenuhi 9 tenaga kesehatan strategis antara lain dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan tenaga ahli laboratorium medik. Pemenuhan tenaga kesehatan tersebut bisa diakomodir melalui perekrutan tenaga kesehatan dengan alokasi dari dana BLUD yang dikelola oleh puskesmas sendiri dan program rekrut tenaga Nusantara Sehat, jika jalur formasi CPNS tidak dibuka oleh pemerintah daerah/pusat. Berikut sebaran jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Ketapang tahun 2024 :



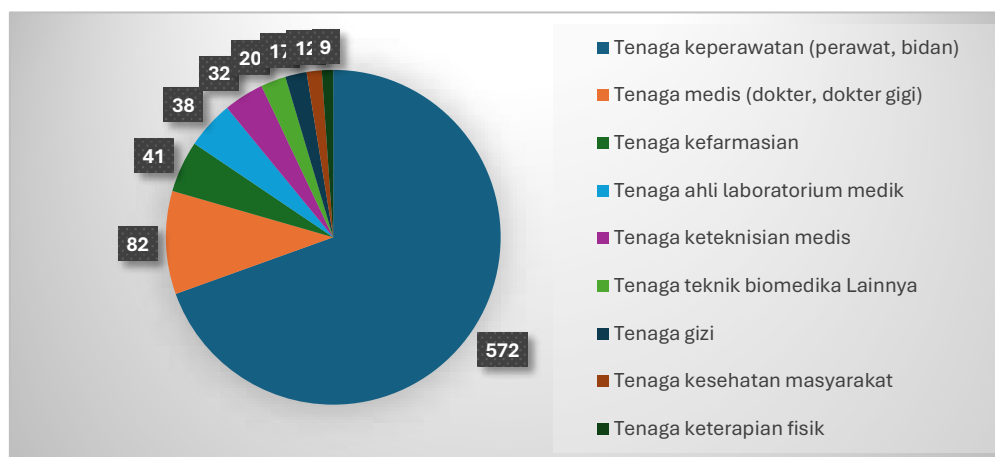
Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2024, Bidang Sumber Daya Kesehatan

2.1.6 Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit). Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Di Kabupaten Ketapang terdapat 1 rumah sakit umum daerah (RSUD dr.Agoesdjam), 1 rumah sakit umum swasta (RS Fatima) dan 1 rumah sakit khusus (RS Permata Bunda).

Menurut hasil dari laporan yang diterima dari semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Ketapang terdapat 823 sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Proporsi tenaga kesehatan terbesar adalah perawat dan bidan sebesar >50% sedangkan proporsi tenaga kesehatan paling rendah adalah tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga keterampilan fisik. Berikut sebaran jumlah tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Ketapang tahun 2024 :



Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2024, Bidang Sumber Daya Kesehatan

Menurut hasil rekapitulasi tenaga Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Ketapang memiliki angka lebih rendah dari ratio tenaga Kesehatan menurut Permenkes Nomor 33 tahun 2015, dimana artinya Kabupaten Ketapang masih kekurangan beberapa tenaga Kesehatan untuk melayani keseluruhan masyarakatnya.

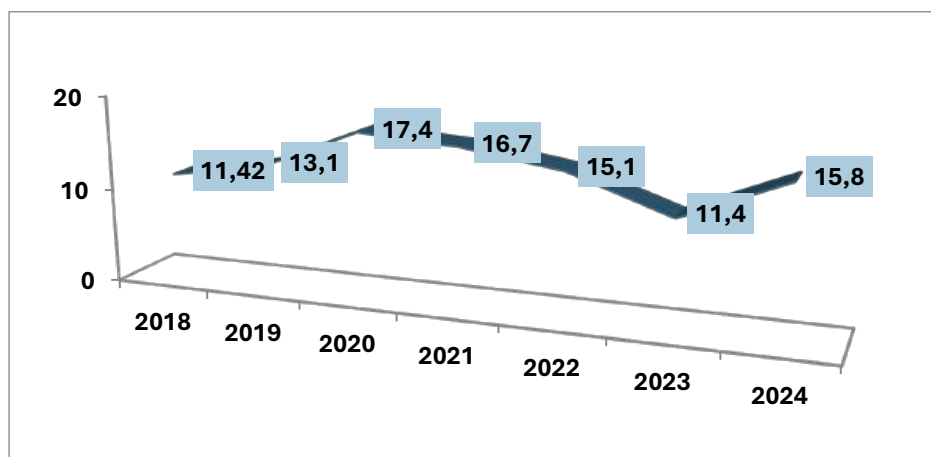
2.1.7 Pembiayaan Kesehatan

Pendanaan kesehatan memainkan peran krusial dalam mewujudkan transformasi kesehatan pasca UU Kesehatan No 17 Tahun 2023. Sumber daya keuangan yang memadai diperlukan untuk memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis, serta mengembangkan sistem informasi kesehatan yang canggih untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam skenario transformasi

kesehatan pasca UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pendanaan kesehatan bukan hanya sekadar aspek teknis, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, pengelolaan pendanaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti sangat penting untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia.

APBD dan APBN

Pembiayaan program dan kegiatan bidang kesehatan di Kabupaten Ketapang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya APBD yaitu APBD (DAU) kabupaten/kota dan dari dana APBN (DAK fisik dan non fisik). Alokasi anggaran untuk pembangunan sektor kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tahun 2018 berkisar diantara 11,4-15,8 persen dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 15,8 persen. Proporsi anggaran untuk sektor kesehatan per tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang adalah sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut ini :



Gambar 2. 5 Grafik Proporsi Alokasi Anggaran Kesehatan Bersumber APBD di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2024

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2024, Tim Sungram Dinkes, RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi kedalam DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK fisik untuk membiayai kegiatan bersifat fisik, sedangkan DAK nonfisik khusus untuk membiayai kegiatan yang bersifat operasional.

DAK Bidang Kesehatan tahun 2024 diantaranya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah. Dana ini diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2024.

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2024 terdiri dari DAK Fisik bidang kesehatan (Penugasan) dan DAK Non Fisik bidang kesehatan meliputi BOK Puskesmas, BOK Kabupaten, DAK Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri secara berkala (triwulan) serta laporan tahunan. Sedangkan untuk data realisasi penggunaan anggaran dilaporkan melalui mekanisme yang berbeda yaitu DAK Fisik dan non Fisik menggunakan aplikasi OMSPAN dan DAK Non Fisik menggunakan aplikasi e-renggar, SiDAKKALBAR dan ALADIN (DJPK-KEMENKEU). Pada tahun 2024, realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dinas Kesehatan dan RSUD Dr.Agoesdjam Kabupaten Ketapang adalah sebesar 98,49% dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk BOK Kabupaten adalah sebesar 90,35%, BOK Puskesmas 82,47% dan BPOM 90,70%.

Total APBD Kabupaten Ketapang pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.737.372.138.846,00 sedangkan total anggaran untuk sektor kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang bersumber dari APBD dan APBN adalah sebesar Rp 433.152.446.616 (15,8%).

Secara ringkas jelasnya alokasi anggaran untuk pembangunan sektor kesehatan dari berbagai sumber sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

THN	SUMBER DANA			JUMLAH (Rp)	% APBD Kesehatan terhadap Total APBD
	APBD / DAU (Rp)	APBN (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)		
2020	223.286.779.961,	15.600.041.328,	116.368.578.000,	393.790.996.104,	17,4
	80	00	00	80	
2021	209.893.931.614,	31.667.760.073,	197.200.541.050,	438.762.232.737,	16,7
	40	00	00	40	
2022	319.830.116.856,	26.124.512.305,	52.318.868.100,0	398.272.297.261,	15,1
	00	00	0	00	
2023	260.661.118.666,	1.444.718.000,0	55.516.487.592,0	317.622.324.258,	11,4
	00	0	0	00	
2024	390.432.876.556,	-	42.719.570.060,0	433.152.446.616,	15,8
	00		0	00	

Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan Menurut Sumber Anggaran Di Kabupaten Ketapang Tahun 2020 – 2024

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2024, Tim Sungram Dinkes, RSUD Dr. Agoesdjarm Ketapang

Berdasarkan data alokasi anggaran tersebut di atas terlihat bahwa biaya program-program kesehatan yang dikelola sektor kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas beserta jaringannya) yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang dan APBN dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menurut jumlah mengalami naik – turun. Sampai tahun 2024 persentase APBD Kabupaten Ketapang terhadap APBD

Kesehatan berada pada posisi 15,8%. Data alokasi anggaran pada tabel tersebut di atas belum memperhitungkan anggaran di luar instansi kesehatan dan sektor swasta.

Alokasi anggaran kesehatan menurut standar adalah minimal 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti bahwa setidaknya 10% dari total anggaran daerah harus dialokasikan untuk sektor kesehatan. Standar ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Target ini diharapkan bisa selalu konsisten dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang turut menentukan tingkat kemakmuran/kemajuan suatu bangsa, disamping pendidikan dan perekonomian.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2011.

Harus diakui bahwa reformasi pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan ini telah banyak memberi manfaat kepada berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Program JKN, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial, seperti pada kasus penyakit katastropis yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Untuk mengetahui data cakupan jaminan kesehatan pra bayar, hanya berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI pusat) yang dibiayai oleh APBN, PBI daerah (APBD kabupaten) dan Non PBI (Askes PNS, TNI/Polri dan pegawai swasta). Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah masyarakat Kabupaten Ketapang yang telah *tercover* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2024 sebanyak 587.859 jiwa. Angka ini meningkat dari tahun 2023 sebanyak 557.162 jiwa. Dengan rincian jumlah penerima bantuan iuran PBI sebanyak 274.505 jiwa dan Non PBI sebanyak 313.859 jiwa.

2.1.8 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks perencanaan jangka menengah, Dinas Kesehatan memiliki target yang harus di capai untuk periode lima tahunan yang termuat didalam Rencana Strategis. Secara rinci pencapaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan target Renstra tahun 2021 – 2026 seperti berikut ini:

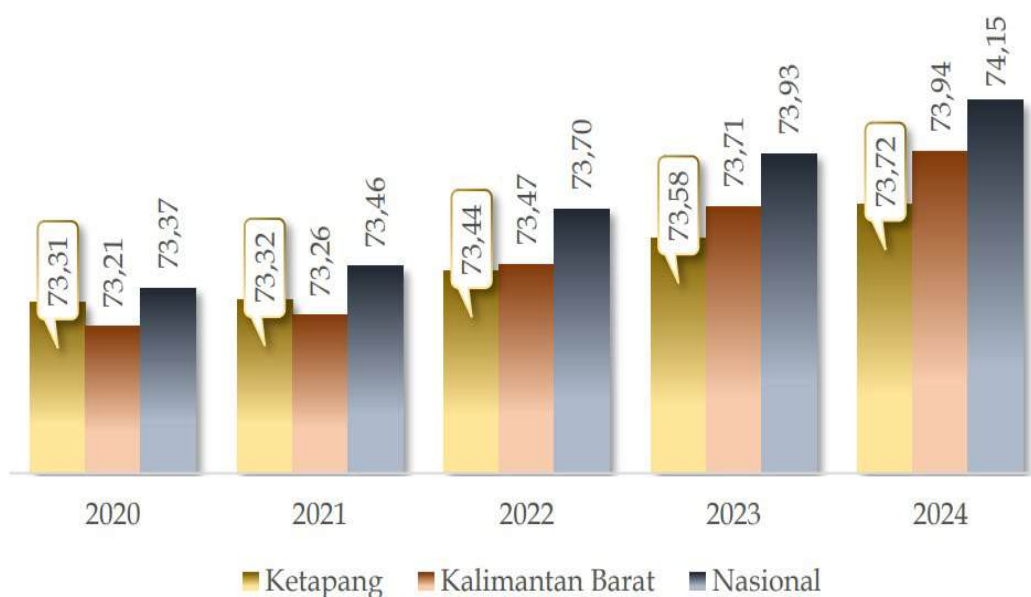
Tabel 2. 3 Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi Renja	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	77%	42%	75.78 %	88.50 %	100 %	100 %
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	69%	20%	59.62 %	65.5 %	100 %	100 %
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	94%	33%	77.59 %	74.10 %	100 %	100 %
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	32%	17%	60.31 %	95.80 %	100 %	100 %
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8%	3%	99.01 %	99.50 %	100 %	100 %
6	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13%	13%	28.82 %	64%	100 %	100 %
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	88%	8%	57.04 %	88%	100 %	100 %
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13%	8%	20.41 %	44%	100 %	100 %
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	58%	59%	89.34 %	100%	100 %	100 %
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	88%	84%	98.51 %	100%	100 %	100 %
11	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	65%	43%	75.78 %	100%	100 %	100 %
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	67%	49%	82.53 %	100%	100 %	100 %
13	Angka Kematian Ibu per	-	230	245	230	210	183	180	175	229	140	251	129	150	129

	100.000 kelahiran hidup														
14	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	-	20.6	19	18	17	16	15	14	9.9	9.2	15.05	15.7	15	14
15	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	-	-	19.5	18.5	17.5	16.5	15.5	14.5	10.3	9.6	15.05	15.8	15.5	14,5
16	Prevalensi stunting pada balita	-	27.1	21.1	18.4	16	14	13	12	16,52 %	20,34 %	19.04	10.24	12	9
17	Insidence rate kasus DBD per 100.0000 penduduk	-	< 49	49	49	49	49	49	49	2.47	5.86	211	24.2	49	49
18	<i>Prevalensi</i> Hipertensi	-	-	24	21	19	17	16	15	14.1	5.02	20.41	37.63	16	15
19	Zonasi pemetaan kasus Covid-19	-	-	Kuning	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
20	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	-	100 %	85%	90%	95%	100 %	100 %	100 %	80%	90%	100 %	100%	100 %	100 %

2.1.8.1 Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)/Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta program pemberantasan kemiskinan. Perbandingan AHH Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan nasional pada tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui gambar berikut.



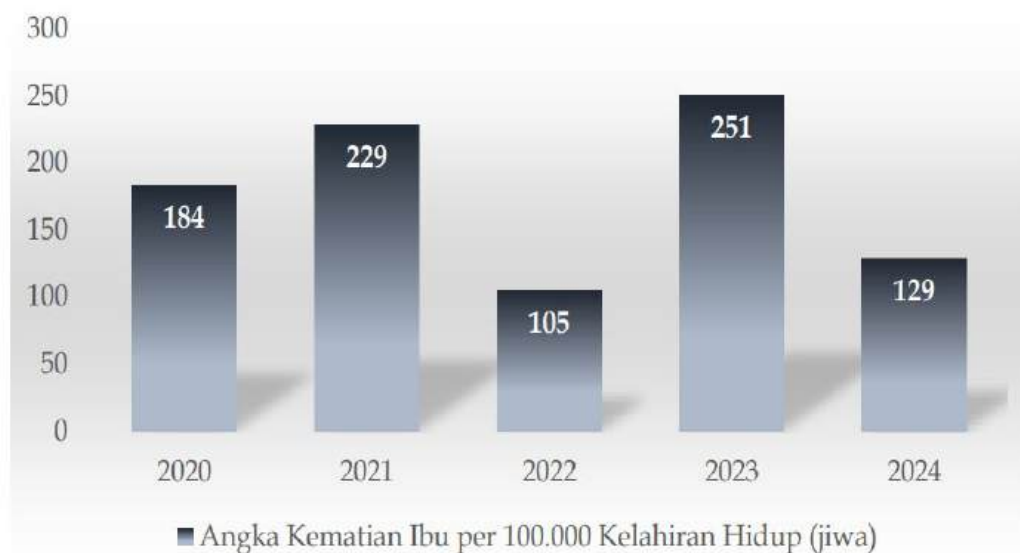
Gambar 2. 6 Perbandingan AHH Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan nasional pada tahun 2020-2024

Jika dilihat pada data di atas, tren Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Ketapang menunjukkan peningkatan konsisten selama lima tahun terakhir (2020–2024), dari 73,31 tahun pada 2020 menjadi 73,72 tahun pada 2024. Peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,14 tahun mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan masyarakat. Namun demikian, AHH Kabupaten Ketapang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (73,94 tahun) dan nasional (74,15 tahun). Selain itu,

laju peningkatan AHH di Ketapang juga cenderung lebih lambat dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup dan pelayanan kesehatan di Ketapang belum sepenuhnya optimal. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih rendah, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang belum merata.

2.1.8.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Data AKI per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang selama tahun 2020–2024 dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 2. 7 Data AKI per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang selama tahun 2020–2024

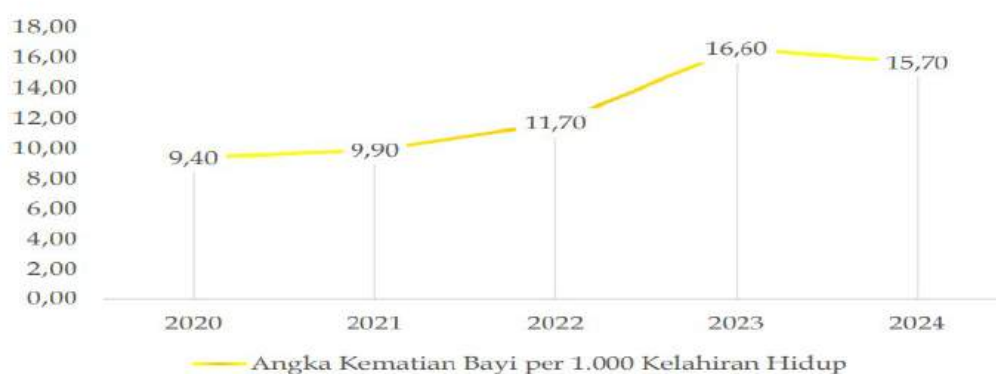
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024, dengan angka sebesar 184 jiwa pada tahun 2020 yang meningkat menjadi 229 jiwa pada 2021, kemudian turun drastis menjadi 105 jiwa pada 2022, namun kembali melonjak ke 251 jiwa pada 2023 sebelum menurun signifikan menjadi 129 jiwa pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kematian ibu belum terlaksana secara konsisten dan merata. Salah satu penyebabnya diduga berasal dari belum optimalnya

pelaksanaan pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) secara rutin dan berkualitas, khususnya di wilayah terpencil. Padahal, Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan standar minimal enam kali pemeriksaan ANC selama masa kehamilan, termasuk pemeriksaan ultrasonografi (USG) sebagai layanan esensial yang kini mulai tersedia di beberapa puskesmas. Untuk menekan AKI secara berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara bidan, dokter umum, dan dokter spesialis kandungan, serta penguatan jejaring Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di puskesmas dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit guna memastikan tersedianya layanan kesehatan ibu dan anak yang responsif dan berkualitas.

2.1.8.3 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang mencerminkan kondisi kesehatan pada kelompok usia bayi, di mana AKB dihitung sebagai jumlah kematian bayi (di bawah usia satu tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun.

AKB, yang mencerminkan probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, merupakan tolok ukur sensitif dari efektivitas intervensi kesehatan. Penurunan angka AKB umumnya mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit penyebab kematian bayi. Capaian AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

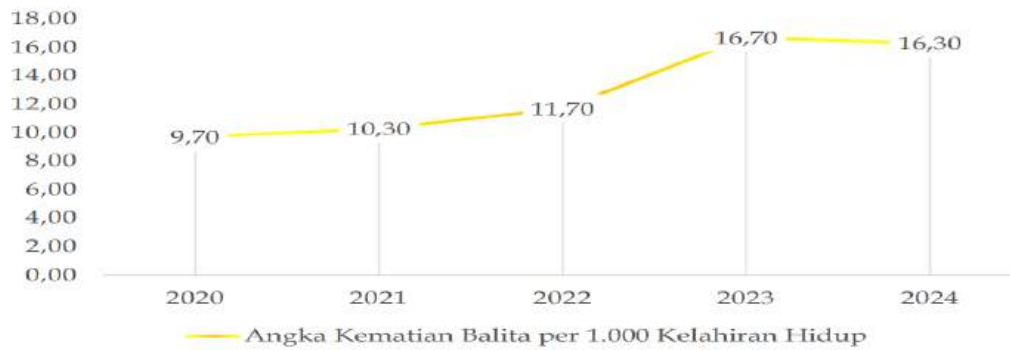


Gambar 2. 8 Capaian AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024

AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Angka terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 9,40, dan meningkat tajam hingga mencapai puncak tertinggi pada tahun 2023 dengan 16,60 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian sedikit menurun menjadi 15,70 pada tahun 2024. Data ini mengindikasikan bahwa semakin banyak bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, sehingga mencerminkan tantangan dalam peningkatan kualitas kesehatan bayi di wilayah tersebut. Peningkatan angka kematian bayi ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya nutrisi selama kehamilan, tingginya kejadian bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau kondisi gizi buruk, serta cakupan Imunisasi Dasar Lengkap yang masih rendah. Upaya peningkatan pelayanan antenatal dan intervensi kesehatan ibu dan bayi sangat diperlukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Ketapang.

2.1.8.4 Angka Kematian Balita (AKBa)

Angka Kematian Balita (AKBa) mengukur jumlah kematian anak balita, yakni anak berusia 0–4 tahun, per 1.000 anak pada populasi yang sama pada pertengahan tahun, yang juga mencakup kematian bayi. Kondisi kesehatan masyarakat juga dapat diukur melalui Angka Kematian Balita (AKBa), yaitu jumlah kematian anak usia 0–4 tahun per 1.000 anak. Indikator ini mencerminkan pencapaian target kelangsungan hidup anak serta menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan dan pemeliharaan kesehatan anak. Selain itu, tingginya AKBa seringkali berkorelasi dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang kurang, dan faktor-faktor lain yang mencerminkan tantangan ekonomi di suatu daerah. Gambaran AKBa per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 9 Gambaran AKBa per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024

Seperti halnya AKB, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2023, AKBa mencapai puncaknya sebesar 16,70, yang berarti dari setiap 1.000 balita (usia 0–4 tahun 11 bulan 29 hari), terdapat sekitar 17 anak yang tidak berhasil mencapai usia 5 tahun. Sebaliknya, pada tahun 2020 angka terendah tercatat sebesar 9,70 per 1.000 kelahiran hidup. Data ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan balita di Kabupaten Ketapang masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain tingginya prevalensi gizi buruk, tingginya tingkat kesakitan pada balita, dan rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap.

2.1.8.5 Pelayanan Kehamilan

Pelayanan antenatal (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilan guna menjaga kesehatan ibu dan janin, sekaligus sebagai upaya strategis menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta perinatal. Cakupan pelayanan kebidanan selama kehamilan diukur melalui tiga indikator utama, yaitu cakupan kunjungan pertama (K1), kunjungan keempat (K4), dan pemberian tablet zat besi. Cakupan K1 menunjukkan persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama tanpa memperhitungkan usia kehamilan, sedangkan K4 mengacu pada ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal empat kali selama kehamilan, masing-masing satu kali pada trimester pertama dan kedua, serta dua kali pada trimester ketiga. Tingginya cakupan K4 menjadi indikator penting dalam memastikan pemantauan kehamilan yang rutin dan berkualitas, sementara cakupan yang rendah dapat mencerminkan kendala

dalam akses atau mutu pelayanan. Data mengenai cakupan pelayanan kesehatan kehamilan di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran yang penting terkait efektivitas layanan antenatal dan tantangan yang masih perlu diatasi.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Ibu Hamil (jiwa)	11.168	10.256	11.258	10.395	11.161	-0,02
Jumlah Kunjungan K1	10.164	9.181	9.833	9.500	10.863	1,68
Jumlah Kunjungan K4	8.156	7.126	7.861	7.877	9.827	4,77
Jumlah Ibu Hamil mendapatkan suplemen Zat Besi (jiwa)	7.301	7.202	7.534	7.974	9.555	6,96
Cakupan Pelayanan K1 (%)	91,00	89,50	87,30	91,39	97,33	1,70
Cakupan Pelayanan K4 (%)	73,00	89,50	69,80	75,78	88,52	4,94
Cakupan Pemberian Zat Besi (%)	65,40	70,20	66,90	76,71	85,61	6,96

Tabel 2. 4 Data mengenai cakupan pelayanan kesehatan kehamilan di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 hingga 2024

Cakupan pelayanan K1 di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup stabil dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 1,70%. Meskipun cakupan K1 sudah tergolong tinggi—mencapai 97,33% pada tahun 2024—peningkatan yang tidak signifikan dari tahun ke tahun mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap kualitas layanan dan pemerataan jangkauan, terutama di wilayah yang menghadapi kendala geografis dan aksesibilitas. Sementara itu, cakupan pelayanan K4, yang mencerminkan persentase ibu hamil yang menjalani pemeriksaan antenatal minimal empat kali sesuai standar, mengalami tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 4,94%. Meskipun pada tahun 2024 capaian K4 mencapai 88,52%, fluktuasi antar tahun menunjukkan bahwa tidak semua ibu hamil dapat melanjutkan pemeriksaan hingga kunjungan keempat. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas kesehatan, jarak tempuh ke pusat layanan, dan kontinuitas pelayanan dari tenaga kesehatan. Selain itu, cakupan pemberian suplemen zat besi menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata

pertumbuhan tahunan sekitar 6,96% dan mencapai 85,61% pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi dan edukasi gizi bagi ibu hamil. Meski demikian, cakupan pemberian suplemen zat besi tersebut masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan target nasional, sehingga upaya peningkatan harus difokuskan pada penguatan edukasi gizi, peningkatan akses layanan, dan pemantauan konsumsi tablet zat besi secara lebih intensif oleh tenaga kesehatan.

2.1.8.6 Pelayanan Kelahiran

Selain pemeriksaan kehamilan, cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan profesional juga merupakan indikator penting dalam menilai kesiapan sistem layanan kesehatan ibu. Tingginya persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis, seperti bidan atau dokter, mencerminkan akses yang baik terhadap layanan persalinan yang aman dan berkualitas, sehingga berkontribusi langsung terhadap upaya penurunan angka kematian ibu. Oleh karena itu, peningkatan cakupan ini perlu terus diupayakan, terutama di wilayah yang masih terbatas fasilitas kesehatannya. Informasi mengenai cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional di Kabupaten Ketapang selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada gambar berikut sebagai bahan evaluasi dan perencanaan intervensi ke depan.



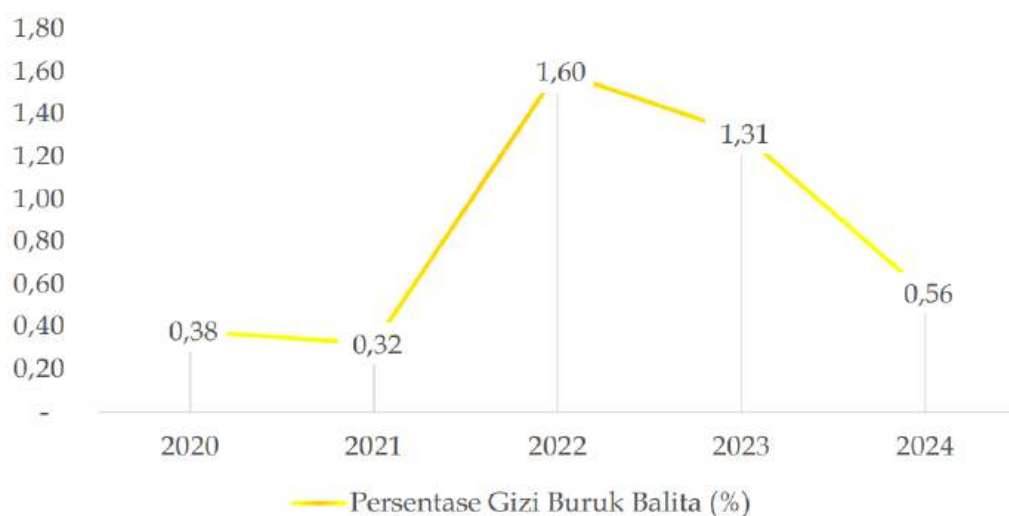
Gambar 2. 10 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional di Kabupaten Ketapang selama periode 2020–2024

Cakupan pelayanan kelahiran oleh tenaga kesehatan kebidanan di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Penurunan paling signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 10,2%, dari 76,4% menjadi 66,2%. Sementara itu, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun berikutnya, yaitu dari 66,2% pada 2022 menjadi 76,3% pada 2023, atau naik sebesar 10,1%. Pada tahun 2024, cakupan menurun sedikit menjadi 74,67%. Secara jumlah absolut ibu bersalin sebenarnya mengalami kenaikan dari 7.567 (2023) ibu bersalin menjadi 8.289 (2024). Hanya saja ketika dipersentasekan, karena pembagiannya adalah sasaran ibu bersalin di tahun 2024 tersebut meningkat, otomatis persentase menjadi lebih kecil. Padahal secara capaian angka absolut mengalami peningkatan capaian. Menariknya, meskipun cakupan pelayanan kelahiran oleh tenaga kesehatan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan pada 2024, angka kematian ibu justru mengalami penurunan dari 251 menjadi 129 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan AKI kemungkinan tidak hanya dipengaruhi oleh cakupan persalinan oleh bidan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti peningkatan kualitas layanan antenatal, ketersediaan fasilitas rujukan darurat, atau intervensi berbasis komunitas. Meskipun demikian, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Ketapang masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, ketersediaan fasilitas dan obat-obatan yang belum merata, serta hambatan finansial dalam mengakses layanan kesehatan.

2.1.8.7 Gizi Buruk

Gizi buruk yang merupakan salah satu bentuk malnutrisi, terjadi ketika asupan makanan yang mengandung energi dan protein tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Malnutrisi sendiri mencakup kesalahan dalam pemberian nutrisi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan asupan, namun dalam konteks ini yang dimaksud adalah kekurangan nutrisi. Anak-anak di negara berkembang, termasuk Indonesia, sering mengalami gizi buruk. Menurut WHO (2020), sekitar 54 persen kematian bayi dan

balita terkait dengan kondisi gizi buruk, dan risiko kematian pada anak yang mengalami gizi buruk dapat mencapai 13 kali lipat lebih tinggi dibandingkan anak dengan status gizi normal. Kondisi gizi buruk ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung, status gizi ibu yang buruk selama kehamilan, tingginya angka penyakit pada bayi, serta kurangnya asupan gizi yang memadai bagi bayi. Berikut adalah gambaran persentase gizi buruk balita di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024.



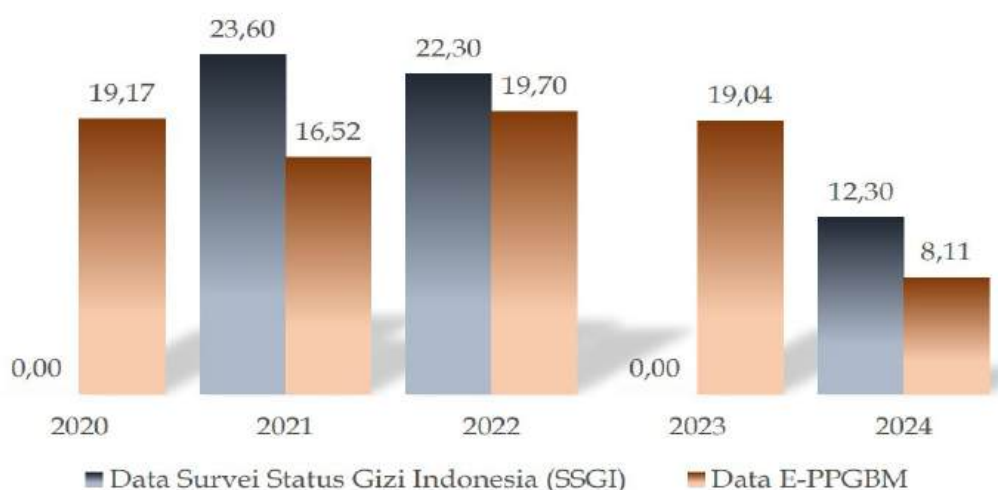
Gambar 2. 11 Gambaran Persentase Gizi Buruk Balita di Kabupaten Ketapang tahun 2020-2024

Tren persentase gizi buruk balita di Kabupaten Ketapang selama periode 2020– 2024 menunjukkan fluktuasi. Persentase terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,32%, sedangkan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,60%. Setelah itu, terjadi penurunan berturut-turut pada tahun 2023 menjadi 1,31% dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,56%. Meskipun angka pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, peningkatan signifikan pada tahun 2022 menunjukkan adanya kerentanan terhadap faktor-faktor yang memicu gizi buruk. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan balita masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gizi buruk antara lain belum optimalnya akses masyarakat terhadap makanan bergizi,

ketidakterjangkauan layanan kesehatan dan gizi di beberapa wilayah, serta kurangnya edukasi gizi kepada orang tua.

Menurut Kementerian Kesehatan (2018), stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Masalah ini sering kali disebabkan oleh buruknya kondisi sosial ekonomi, kurangnya asupan gizi ibu saat hamil, frekuensi kesakitan pada bayi, serta asupan gizi yang tidak memadai. Anak balita yang mengalami stunting berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan fisik dan kognitif, serta berpotensi lebih besar menderita penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, dan gangguan pembuluh darah di usia dewasa.

Berdasarkan data UNICEF dan WHO, angka prevalensi stunting Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting. Hal ini menjadikan Indonesia berada di urutan ke-5 diantara negara-negara di Asia. Angka nasional prevalensi stunting tahun 2023 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 21,5%, hanya turun 0,1% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 21,6%. Sementara itu, prevalensi balita stunting di Kabupaten Ketapang tahun 2020-2024 dapat dicermati melalui gambar berikut.



Gambar 2. 12 prevalensi balita stunting di Kabupaten Ketapang tahun 2020-2024

Tren prevalensi stunting di Kabupaten Ketapang selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan berdasarkan dua sumber utama, yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Berdasarkan SSGI, prevalensi stunting tercatat sebesar 23,60% pada 2021, menurun menjadi 22,30% di 2022, dan turun drastis menjadi 12,30% pada 2024, sementara data untuk tahun 2023 tidak tersedia, kemungkinan akibat kendala teknis seperti rendahnya respons dari rumah tangga sasaran. Untuk melengkapi kekosongan data tersebut, digunakan data e-PPGBM yang menunjukkan angka sebesar 19,17% pada 2020, turun menjadi 16,52% di 2021, lalu meningkat kembali menjadi 19,40% di 2022 dan 19,70% pada 2023, sebelum akhirnya menurun tajam ke angka 8,11% pada 2024.

Meskipun terdapat perbedaan angka antara kedua sumber, keduanya menunjukkan pola tren yang relatif searah, yaitu peningkatan hingga 2022 dan penurunan signifikan pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya dampak positif dari berbagai upaya percepatan penanganan stunting, baik melalui perbaikan gizi anak dan ibu hamil, peningkatan cakupan layanan kesehatan, maupun edukasi masyarakat. Namun demikian, hasil ini tetap perlu ditelaah lebih dalam agar penurunan yang terjadi benar-benar mencerminkan perbaikan kondisi di lapangan, bukan semata-mata karena perbedaan metode pengumpulan data atau cakupan responden.

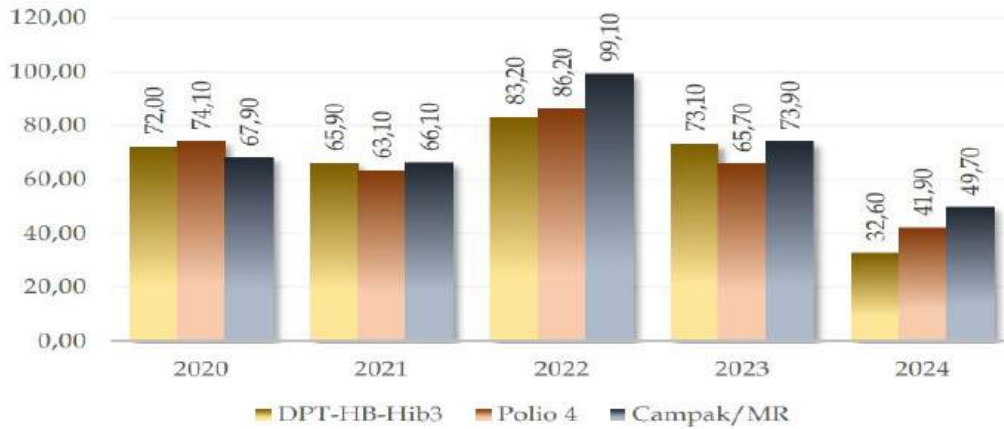
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan stunting di Kabupaten Ketapang masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. Konsistensi pelaksanaan program, penguatan intervensi spesifik seperti pemantauan tumbuh kembang balita dan pemberian makanan tambahan, serta intervensi sensitif seperti peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan edukasi gizi keluarga perlu terus didorong secara terpadu agar tren penurunan prevalensi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu mencapai target nasional secara merata dan berkelanjutan.

2.1.8.8 Imunisasi

Pengurangan angka kesakitan pada balita dapat dilakukan melalui berbagai upaya preventif, salah satunya adalah pemberian imunisasi. Imunisasi berperan krusial dalam mencegah penyakit menular yang berisiko tinggi terhadap kesehatan anak, seperti campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan polio. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jutaan anak di dunia masih belum memperoleh imunisasi lengkap setiap tahunnya, bahkan sebagian di antaranya sama sekali belum pernah menerima imunisasi. Padahal, untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), cakupan imunisasi harus tinggi dan merata, dengan ambang minimal sebesar 95%. Ketidakteraturan cakupan ini berisiko meningkatkan kejadian luar biasa (KLB) terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Sebagai respons terhadap hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan program "Imunisasi Lengkap, Indonesia Sehat" yang bertujuan meluruskan informasi keliru terkait imunisasi, memobilisasi sumber daya untuk menyosialisasikan manfaat imunisasi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan vaksin bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini juga difokuskan pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan imunisasi. Di Indonesia, terdapat lima jenis Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang dianjurkan, yaitu BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B, yang diberikan pada masa bayi sebagai perlindungan awal terhadap penyakit menular berisiko tinggi.

Sebagai respons terhadap hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan program "Imunisasi Lengkap, Indonesia Sehat" yang bertujuan meluruskan informasi keliru terkait imunisasi, memobilisasi sumber daya untuk menyosialisasikan manfaat imunisasi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan vaksin bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini juga difokuskan pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan imunisasi. Di Indonesia, terdapat lima jenis Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang dianjurkan, yaitu BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B, yang diberikan pada masa bayi sebagai perlindungan awal terhadap penyakit menular berisiko tinggi.



Gambar 2. 13 Tren persentase bayi dan balita yang menerima imunisasi DPT-HB-Hib3, Polio 4, dan Campak/MR di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024

Tren persentase bayi dan balita yang menerima imunisasi DPT-HB-Hib3, Polio 4, dan Campak/MR di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024. Cakupan tertinggi untuk ketiga jenis imunisasi tersebut terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 83,20% untuk DPT-HB-Hib3, 86,20% untuk Polio 4, dan 99,10% untuk Campak/MR. Namun, pada tahun 2024 cakupan turun signifikan menjadi 32,60% untuk DPT-HB-Hib3, 41,90% untuk Polio 4, dan 49,70% untuk Campak/MR. Penurunan cakupan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan program imunisasi, baik dari sisi aksesibilitas, distribusi vaksin, maupun partisipasi masyarakat. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah menurunnya kesadaran atau kepercayaan orang tua terhadap pentingnya imunisasi, serta potensi kendala dalam pendataan dan pelaporan cakupan yang akurat. Penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap ini perlu segera ditangani, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi.

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 2.30, angka kematian balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Ketapang mengalami tren peningkatan sepanjang periode 2020–2024, dari 9,70 pada tahun 2020 menjadi 16,70 pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 16,30, angka tersebut tetap menunjukkan tingkat kematian yang tinggi. Menarik untuk dicermati bahwa

meskipun cakupan imunisasi pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan, angka kematian balita justru mengalami lonjakan tertinggi pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan cakupan imunisasi dengan tren penurunan angka kematian. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini antara lain:

Pertama, efektivitas imunisasi membutuhkan waktu untuk menghasilkan perlindungan optimal (lag time), sehingga dampak terhadap penurunan kematian balita mungkin belum dapat dirasakan secara langsung pada tahun yang sama.

Kedua, angka kematian balita dipengaruhi oleh berbagai determinan lain di luar cakupan imunisasi, seperti status gizi, kualitas sanitasi lingkungan, ketersediaan dan akses terhadap layanan kesehatan dasar, serta kejadian penyakit atau faktor risiko lainnya yang tidak tercakup dalam program imunisasi.

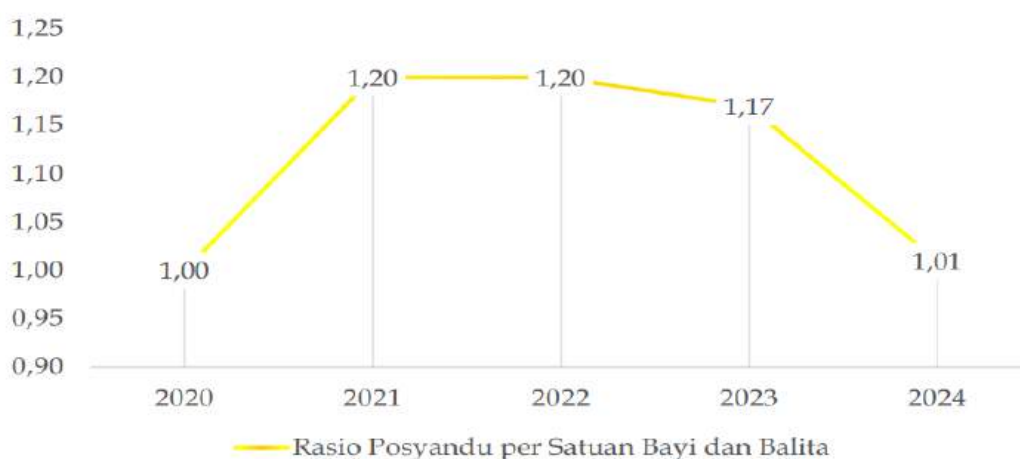
Ketiga, capaian cakupan imunisasi secara kuantitatif belum tentu merepresentasikan kualitas pelaksanaan. Ketidaktepatan jadwal pemberian vaksin, kualitas rantai dingin (cold chain) yang tidak terjaga, atau ketidaktuntasan dosis dapat memengaruhi efektivitas perlindungan.

Oleh karena itu, tingginya angka kematian balita pada tahun 2023 meskipun disertai peningkatan cakupan imunisasi menegaskan bahwa penanggulangan kematian balita tidak dapat mengandalkan imunisasi semata. Diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, meliputi peningkatan gizi anak, perbaikan sanitasi dan air bersih, edukasi kesehatan keluarga, serta penguatan layanan kesehatan dasar.

2.1.8.9 Posyandu

Keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi sangat penting sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Tujuan utama pengembangan posyandu adalah memberdayakan masyarakat dan mempermudah

mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan, guna mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta Angka Kematian Balita (AKBa). Sebagai sarana pemantauan kesehatan bayi dan balita, posyandu menyediakan layanan seperti penimbangan berat badan, pemantauan pertumbuhan, imunisasi, penyuluhan gizi, dan deteksi dini masalah kesehatan. Oleh karena itu, ketersediaan posyandu menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan anak. Tingkat ketersediaan ini dapat diukur melalui rasio jumlah posyandu terhadap jumlah bayi dan balita, yang mencerminkan sejauh mana pemerataan layanan kesehatan dasar menjangkau kelompok sasaran. Data mengenai rasio posyandu terhadap bayi dan balita di Kabupaten Ketapang pada periode 2020–2024 dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat ke depan.



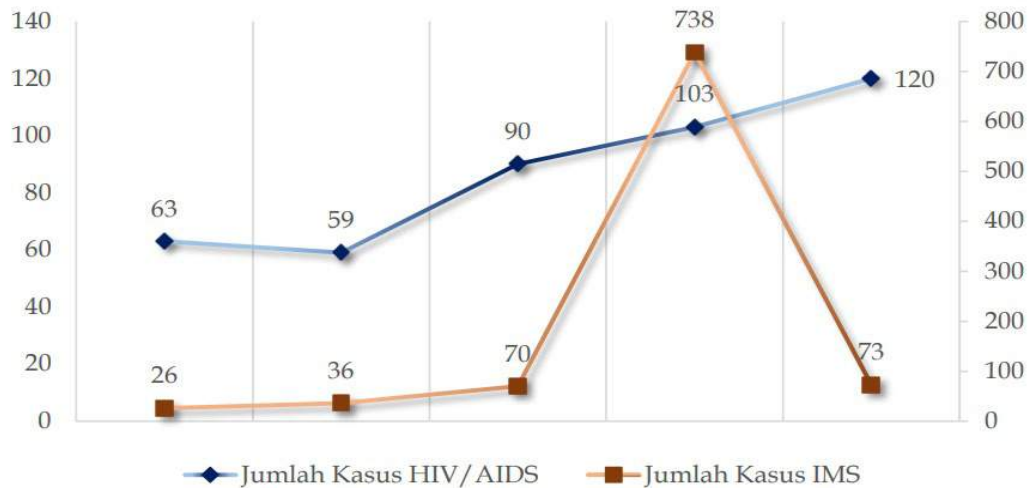
Gambar 2. 14 rasio posyandu terhadap bayi dan balita di Kabupaten Ketapang pada periode 2020–2024

Rasio posyandu per satuan bayi dan balita di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Rasio tersebut mengalami peningkatan dari 1,00 pada tahun 2020 menjadi 1,20 pada tahun 2021 dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 1,17, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 1,01. Penurunan rasio ini tidak secara langsung menunjukkan berkurangnya jumlah bayi dan balita, melainkan dapat

mengindikasikan adanya penurunan jumlah posyandu aktif atau perubahan distribusi jumlah bayi dan balita yang tidak diimbangi dengan penambahan atau aktivasi posyandu baru. Meskipun rasio sempat membaik pada 2021 dan 2022, penurunan pada dua tahun terakhir mengisyaratkan perlunya penguatan kembali peran serta ketersediaan posyandu untuk menjamin akses layanan kesehatan dasar yang merata bagi bayi dan balita di Kabupaten Ketapang.

2.1.8.10 Angka Kesakitan

Kualitas kesehatan masyarakat tidak hanya diukur dari angka kematian, tetapi juga tercermin melalui tingkat kesakitan penduduk. Informasi mengenai derajat kesehatan ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan bidang kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan merata. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), keluhan kesehatan didefinisikan sebagai gangguan fisik atau mental, termasuk akibat kecelakaan, yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Keluhan yang umum dialami penduduk mencakup demam, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma, dan sakit gigi. Bahkan, penderita penyakit kronis tetap dikategorikan memiliki keluhan kesehatan meskipun saat survei penyakitnya tidak sedang kambuh. Secara umum, angka kesakitan mengukur frekuensi penduduk yang mengalami keluhan atau penyakit dalam periode tertentu dan menjadi indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, maka semakin rendah derajat kesehatan masyarakat tersebut. Salah satu kelompok penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS, yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual tidak aman, serta melalui cairan tubuh seperti darah, sperma, dan cairan vagina. Penularan juga dapat terjadi akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian. Data jumlah kasus HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting terkait kondisi kesehatan masyarakat dan perlunya penguatan upaya promotif serta preventif secara berkelanjutan.



Gambar 2. 15 Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren kenaikan selama periode 2020 hingga 2024

Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren kenaikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 63 kasus, dan meningkat menjadi 120 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penularan HIV/AIDS masih menjadi isu kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko penularan, ditambah dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya—seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan—turut berkontribusi terhadap tingginya angka kasus. Kenaikan jumlah kasus HIV/AIDS ini juga sejalan dengan tren Infeksi Menular Seksual (IMS) yang mengalami lonjakan signifikan dalam periode yang sama. Jumlah kasus IMS meningkat dari 26 kasus pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya sebesar 738 kasus pada tahun 2023, sebelum menurun menjadi 73 kasus pada tahun 2024. Lonjakan tajam pada tahun 2023 perlu dianalisis lebih lanjut, baik dari sisi pelaporan maupun kemungkinan peningkatan upaya deteksi kasus. Kondisi ini mencerminkan bahwa risiko penularan penyakit menular seksual di masyarakat masih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang komprehensif melalui edukasi mengenai kesehatan reproduksi, peningkatan sosialisasi dan promosi kesehatan, serta pemerataan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Selain HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS), dua penyakit menular lain yang juga memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat adalah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB). DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari empat jenis virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Penyakit ini berpotensi menimbulkan komplikasi serius, bahkan dapat berujung pada kematian apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Sementara itu, TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang paling sering menyerang paru-paru. Gejala utamanya meliputi batuk berdarah yang berlangsung lebih dari tiga minggu, demam, penurunan berat badan, dan dalam beberapa kasus disertai batuk berdarah. Selain paru-paru, infeksi TB juga dapat menyebar ke organ tubuh lainnya seperti tulang, usus, dan kelenjar getah bening. Penularan TB terjadi melalui percikan ludah penderita saat batuk, bersin, atau berbicara. Kedua penyakit ini masih menjadi tantangan serius dalam bidang kesehatan, termasuk di Kabupaten Ketapang, mengingat jumlah kasus yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan kasus DBD dan TB sangat penting dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit menular dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data mengenai jumlah kasus DBD dan TB di Kabupaten Ketapang selama periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

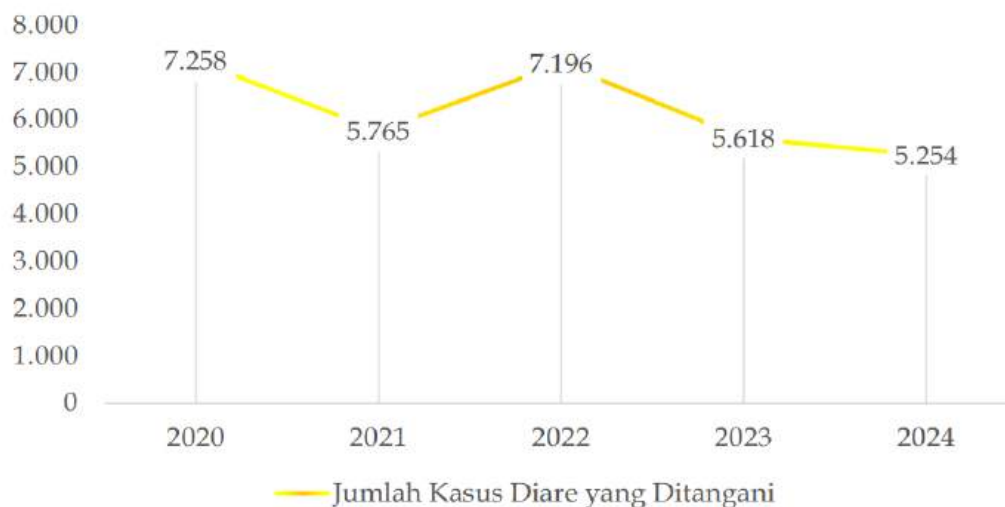


Gambar 2. 16 Data mengenai jumlah kasus DBD dan TB di Kabupaten Ketapang selama periode 2020 hingga 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah kasus DBD dan TB di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren yang fluktuatif, namun cenderung meningkat. Kasus DBD tercatat sebanyak 222 kasus pada tahun 2020, kemudian menurun drastis menjadi 13 kasus pada 2021. Namun, jumlah tersebut kembali meningkat signifikan hingga mencapai 1.143 kasus pada tahun 2023, sebelum turun menjadi 145 kasus pada tahun 2024. Lonjakan kasus DBD tersebut mengindikasikan adanya peningkatan risiko penularan akibat kurang optimalnya upaya pemberantasan sarang nyamuk, menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, serta rendahnya pemahaman mengenai gejala dan penanganan dini DBD. Di sisi lain, kasus TB mengalami penurunan dari 502 kasus pada tahun 2020 menjadi 461 kasus pada tahun 2021, namun kembali naik secara signifikan hingga mencapai 1.227 kasus pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 1.157 kasus pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa TB masih menjadi masalah kesehatan serius di Kabupaten Ketapang, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya deteksi dini, pengobatan yang tidak tuntas, dan kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya promotif dan preventif yang lebih efektif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan edukasi kesehatan serta akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, penyakit diare juga merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang. Diare merupakan penyakit menular yang ditandai dengan buang air besar dengan frekuensi lebih sering dan konsistensi yang lebih cair dari biasanya. Penyakit ini sangat berbahaya, terutama bagi bayi dan balita, karena dapat menyebabkan dehidrasi berat hingga kematian apabila tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, pemantauan jumlah kasus diare menjadi hal yang krusial dalam evaluasi kondisi kesehatan masyarakat. Gambaran jumlah kasus diare yang ditangani di Kabupaten Ketapang selama periode 2020–2024 dapat

diketahui melalui gambar berikut.



Gambar 2. 17 Gambaran jumlah kasus diare yang ditangani di Kabupaten Ketapang selama periode 2020–2024

Jumlah kasus diare yang ditangani di Kabupaten Ketapang pada periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif. Setelah mencatat 7.258 kasus pada tahun 2020, jumlah kasus menurun pada 2021, meningkat kembali di tahun 2022, dan kembali menurun pada 2023 hingga mencapai angka terendah sebesar 5.254 kasus di tahun 2024. Penurunan dalam dua tahun terakhir ini dapat menjadi indikasi awal adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta perbaikan akses sanitasi. Namun, karena fluktuasi masih terjadi dalam rentang waktu tersebut, maka upaya promotif dan preventif tetap perlu ditingkatkan secara konsisten untuk mengendalikan angka kejadian diare secara lebih signifikan.

Di samping penyakit diare, Kabupaten Ketapang juga menghadapi ancaman serius dari penyakit zoonosis seperti rabies yang berpotensi menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Rabies merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan terinfeksi, terutama anjing dan kucing. Meskipun jumlah kasus rabies tidak sebanyak diare, risikonya jauh lebih fatal. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pengendalian rabies melalui pendekatan lintas sektor (One Health), yaitu pelayanan kesehatan terpadu

antara Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melibatkan peran aktif masyarakat. Pemerintah juga akan menyediakan Pedoman Penanggulangan Rabies untuk seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan sebagai acuan dalam penanganan kasus. Selain itu, pelatihan khusus diberikan kepada pengelola program zoonosis dari berbagai sektor — manusia, hewan, hingga satwa liar — untuk meningkatkan kapasitas respons.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Dinas Kesehatan juga akan membentuk Rabies Center di beberapa Puskesmas strategis yang memiliki dokter hewan dan puskesmas, seperti di PKM Muliabaru, Kedondong, Sukabangun, Kendawangan, Sei Melayu, Air Upas, Marau, Balai Berkuak, Sandai, dan Nanga Tayap. Ketersediaan logistik seperti Vaksin Anti Rabies (VAR), Serum Anti Rabies (SAR), serta media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) juga terus dipastikan agar mencukupi kebutuhan. Dalam penanganan kasus, pemerintah juga akan melaksanakan penyelidikan epidemiologi terpadu lintas sektor dan pelacakan kontak apabila terjadi kasus rabies. Surveilans rabies pada manusia dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Dini sebagai langkah deteksi dan respon cepat dalam mencegah penyebaran penyakit ini.

2.1.8.11 Penyakit Tidak Menular

Angka kesakitan akibat penyakit tidak menular juga perlu menjadi perhatian dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. Beberapa jenis penyakit tidak menular yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di Kabupaten Ketapang antara lain Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hipertensi, gastritis, dan radang sendi. Penyakit-penyakit ini umumnya berkaitan dengan pola hidup, lingkungan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Pemantauan jumlah kasus penyakit tidak menular ini penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang tepat di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Data mengenai jumlah kasus ISPA, hipertensi, gastritis, dan radang sendi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Jenis Penyakit	Jumlah Kasus					Rata-rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA	14.290	16.457	7.548	28.903	25.525	15,61
Hipertensi	140.388	142.371	16.238	25.237	75.407	-14,39
Gastritis	7.243	8.430	15.051	21.171	14.678	19,31
Radang Sendi	5.005	5.143	5.574	8.900	9.866	18,49

Tabel 2. 5 Jumlah kasus ISPA, hipertensi, gastritis, dan radang sendi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 hingga 2024

Berdasarkan data jumlah kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Ketapang selama periode 2020–2024, sebagian besar jenis penyakit menunjukkan tren peningkatan. Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), gastritis, dan radang sendi masing-masing mencatat rata-rata pertumbuhan tahunan yang cukup tinggi, yakni sebesar 15,61%, 19,31%, dan 18,49%. Peningkatan kasus ISPA yang mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 28.903 kasus diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan, perubahan cuaca, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan saluran pernapasan. Tren serupa terjadi pada kasus gastritis yang mencapai angka tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 21.171 kasus. Gastritis umumnya dipicu oleh pola makan yang tidak teratur, konsumsi makanan yang kurang higienis, serta infeksi bakteri *Helicobacter pylori*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan makanan dan kesehatan sistem pencernaan. Kasus radang sendi juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 9.866 kasus. Radang sendi dapat disebabkan oleh infeksi maupun gaya hidup tidak sehat, sehingga peningkatan kasus ini mengindikasikan perlunya edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi. Di sisi lain, penyakit hipertensi justru menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar -14,39%. Meskipun kasus hipertensi tercatat sangat

tinggi pada tahun 2020 dan 2021 (masing-masing lebih dari 140.000 kasus), jumlah tersebut menurun drastis pada tahun 2022 menjadi 16.238 kasus, dan kembali meningkat menjadi 75.407 kasus pada tahun 2024. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pengendalian tekanan darah. Namun demikian, fluktuasi data tersebut menunjukkan bahwa upaya promotif dan preventif masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa risiko kesakitan akibat penyakit tidak menular di Kabupaten Ketapang masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah pencegahan.

Penyakit tidak menular yang juga perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Ketapang adalah gangguan kejiwaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual guna mewujudkan individu yang sehat jiwa. Regulasi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menurunkan angka kesakitan akibat gangguan jiwa. Sebagai bentuk implementasi Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKBJM), Pemerintah Kabupaten Ketapang telah membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sejak tahun 2016, yang bertugas menekan peningkatan kasus gangguan jiwa di wilayahnya. Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan UKBJM adalah keterlibatan Puskesmas yang bekerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanganan gangguan jiwa. Dalam rangka mengevaluasi kondisi kesehatan jiwa masyarakat, data jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Ketapang menjadi indikator awal yang penting. Data ini tidak hanya mencerminkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan serta merumuskan strategi kebijakan ke depan yang lebih tepat

sasaran. Jumlah kasus ODGJ berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Ketapang selama periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kecamatan	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kendawangan	71	76	57	111	138
Manis Mata	16	18	26	24	101
Marau	32	48	44	41	30
Singkup	22	23	19	17	18
Air Upas	21	24	33	40	33
Jelai Hulu	42	47	47	53	46
Tumbang Titi	25	44	27	64	82
Pemahan	8	13	8	1	16
Sungai Melayu Rayak	32	37	19	71	35
Matan Hilir Selatan	85	77	93	161	80
Benua Kayong	137	147	104	121	104
Matan Hilir Utara	34	40	35	103	57
Delta Pawan	185	245	349	780	217
Muara Pawan	45	61	22	4	54
Nanga Tayap	31	41	79	81	109
Sandai	45	53	23	53	38
Hulu Sungai	23	27	10	30	17
Sungai Laur	19	23	23	28	78
Simpang Hulu	40	42	40	44	61
Simpang Dua	29	45	28	109	88
Ketapang	942	1.131	1.086	1.936	1.402

Tabel 2. 6 Jumlah kasus ODGJ berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Ketapang selama periode 2020 hingga 2024

Secara umum, jumlah kasus ODGJ di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah kasus terendah tercatat pada tahun 2020 sebanyak 942 kasus, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai puncaknya sebesar 1.936 kasus. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut kembali menurun menjadi 1.402 kasus. Meskipun penyebab pasti peningkatan kasus belum dapat dipastikan, fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti predisposisi genetik, tekanan sosial, kondisi lingkungan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa.

Pada tahun 2024, lima kecamatan dengan jumlah kasus ODGJ tertinggi adalah Delta Pawan, Kendawangan, Nanga Tayap, Benua Kayong, dan Manis Mata, masing-masing mencatat lebih dari 100 kasus. Delta Pawan menempati posisi tertinggi dengan total 217 kasus. Tingginya angka ini mengindikasikan masih besarnya prevalensi gangguan jiwa berat dan kronis di wilayah tersebut. Beberapa faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap tingginya angka ODGJ meliputi riwayat keluarga dengan gangguan jiwa, kondisi psikososial yang tidak stabil seperti trauma atau kekerasan, serta penyalahgunaan zat adiktif seperti alkohol dan narkoba. Di sisi lain, kecamatan dengan jumlah kasus ODGJ terendah pada tahun 2024 adalah Pemahan, dengan 16 kasus.

Untuk menindaklanjuti permasalahan kesehatan jiwa, terutama pada masyarakat yang mengalami depresi, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan skrining kesehatan jiwa sesuai panduan, yaitu menggunakan instrumen SDQ untuk usia 7–18 tahun dan SRQ untuk usia 18 tahun ke atas. Hasil skrining yang menunjukkan status abnormal atau borderline kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian edukasi kesehatan jiwa di puskesmas oleh petugas terlatih agar gejala yang timbul tidak semakin berat. Selanjutnya dilakukan penegakan diagnosis dan pemberian pengobatan yang sesuai kepada pasien depresi agar gejala yang muncul dapat berkurang, tidak berkembang menjadi skizofrenia, serta menghilangkan keinginan untuk bunuh diri. Pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap pasien yang telah terdiagnosis depresi melalui kunjungan ulang maupun home visit untuk memastikan kesinambungan pengobatan dan pemulihan pasien.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (das sein) dengan kenyataan/realitas (das sollen). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD adalah permasalahan pembangunan daerah, yakni kesenjangan

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun.

Selanjutnya, permasalahan dipetakan menggunakan pendekatan pohon masalah yang mencakup masalah utama, masalah pendukung, dan akar permasalahan. Hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Ketapang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pembangunan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Sosial	Kualitas SDM belum optimal	Belum optimalnya akses dan kualitas kesehatan	Beberapa wilayah sulit dijangkau, menyebabkan proses rujukan tidak tepat waktu
			Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar sesuai standar
			Mutu layanan rumah sakit masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya kualitas kesehatan ibu dan bayi
			Belum optimalnya upaya kesehatan lingkungan
			Jumlah, jenis, dan distribusi tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan

Berikut adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan telaah capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pada *focus group discussion* RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	<p>Beberapa wilayah masih sulit dijangkau seperti hanya bisa dilalui lewat sungai, kondisi jalan yang berbentuk tanah dan berlubang, sehingga menghambat pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menjadi penyebab rujukan tidak tepat waktu</p> <p>Beberapa fasilitas kesehatan perlu di rehab dan membangun Baru</p> <p>Beberapa puskesmas belum memiliki layanan rawat inap</p> <p>Ketersediaan obat dan alat kesehatan masih perlu ditingkatkan</p> <p>Masih terbatasnya alat kesehatan terbaru di Puskemas maupun Rumah Sakit</p> <p>Terbatasnya lahan untuk pengembangan Rumah Sakit</p> <p>Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMRS</p> <p>Pengendalian dan penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal</p>

			Upaya promosi kesehatan masih Kurang
			Masih adanya kepercayaan yang menghambat kualitas kesehatan seperti belum percaya pengobatan di fasilitas kesehatan, buang air di toilet menyebabkan ilmu luntur, bayi kecil karena keturunan bukan prematur, dan sebagainya
		Kualitas kesehatan ibu belum optimal	Belum semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan (K6)
			Masih ada ibu hamil yang melahirkan tidak di fasilitas Kesehatan
			Akses menuju rumah sakit rujukan terlalu jauh dan kondisi jalan yang kurang memadai dapat membahayakan kondisi ibu hamil
			Belum adanya layanan PONEC di Puskesmas
			Transportasi untuk rujukan masih Terbatas
			Distribusi buku kesehatan ibu dan anak (KIA) untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan anak masih terbatas
		Kualitas kesehatan bayi belum optimal	Belum semua bayi melakukan imunisasi dasar lengkap. Masih ada pro dan kontra terkait Imunisasi
			Pengetahuan keluarga terkait gizi balita masih kurang seperti ASI eksklusif dan MPASI
			Terbatasnya distribusi buku kesehatan ibu dan anak (KIA) untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan anak

		Belum optimalnya kesehatan lingkungan	Masih terbatasnya kepemilikan sanitasi yang layak. Baru ada 14 desa yang ODF (<i>Open Defecation Free</i>)
			Ketersediaan air bersih masih Kurang
			Upaya promosi kesehatan masih Kurang
			Belum optimalnya upaya pemicuan kesehatan
		Belum optimalnya ketersediaan tenaga kesehatan	Jumlah, jenis dan distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas masih perlu ditingkatkan
			Jumlah dokter sub spesialis di Rumah Sakit masih kurang

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Ketapang pada urusan kesehatan dapat dilihat melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 sebesar 73,31 menjadi 73,72 pada tahun 2024. Meskipun demikian, AHH Kabupaten Ketapang lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Indonesia pada tahun 2020-2024. Hal tersebut mengindikasikan masih belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

Selain dari itu, pendekatan terbaru tidak semata-mata untuk melihat tahun hidup (AHH), namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (*Healthy Adjusted Life Expectancy/HALE*). HALE orang Indonesia secara rerata adalah 62,65 tahun, artinya jika di kaitkan dengan AHH orang di Kabupaten Ketapang, maka terdapat 8,45 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

memiliki target untuk meningkatkan HALE menjadi 65 tahun dalam Rencana Induk Kesehatan 2025-2029.

Permasalahan lain yang ada di Kabupaten Ketapang yakni masih terdapat kecenderungan naik turun untuk Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). *Prevalensi stunting* pada balita sudah cenderung menurun namun penurunan *prevalensi stunting* belum terlihat secara *signifikan*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan. Secara rinci pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan kesehatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahny derajat kesehatan masyarakat	Rendahny kualitas kesehatan ibu	Rendahny cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan
		Rendahny cakupan kunjungan K1
		Rendahny cakupan kunjungan K4
	Rendahny kualitas kesehatan bayi	Tingginy persentase bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Rendahny cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 1
		Rendahny cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 3
		Rendahny cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
	Tingginy prevalensi stunting	Tingginy persentase ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK)
		Rendahny persentase Desa yang melaksanakan STBM
	Rendahny kualitas kesehatan	Kurangny penerapan PHBS
Tingginy angka kesakitan penyakit menular		

masyarakat	Tingginya kesakitan penyakit tidak menular
	Rendahnya cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan kesehatan

2.2.2 Isu Strategis

Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Analisis isu-isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman berkenaan dengan isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara berkala. Berdasarkan identifikasi permasalahan, hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan

selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini dan hasil telaah lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas Kesehatan adalah: **“Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat”**.

Isu-isu penting terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang di antaranya adalah :

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Percepatan penurunan Stunting
4. Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
6. Integrasi Kebersertaan JKN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Renstra

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif, sehingga pencapaian target merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *benefits* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah "**meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**", dengan indikator tujuan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari kondisi awal 73,72 menjadi 75 tahun di masa akhir yakni tahun 2030.

3.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan startegis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, rasional/dapat dicapai berdasarkan kemampuan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki, berorientasi

hasil dan dapat dicapai pada periode waktu tertentu. Sasaran Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun periode 2025 – 2029 juga disertai dengan indikator kerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dan dijadikan tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi Bupati Ketapang. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menetapkan sasaran yaitu **“meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan”** dengan indikator sasaran:

1. Jumlah kematian ibu
2. Angka kematian bayi
3. *Prevalensi* stunting pada balita
4. Angka kesakitan
5. Secara rinci rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Casecading Renstra 2025-2029

VISI : PEMBANGUNAN BERKEADILAN UNTUK KABUPATEN KETAPANG MAJU DAN MANDIRI

MISI : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

Isu Strategis : MASIH RENDAHNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan											
- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun) (Nilai)	73.72	74	74.20	74.40	74.60	74.80	75	
		Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Jumlah kematian ibu (Orang)	11	14	14	13	13	12	12	
			Prevalensi stunting pada balita (%)	17.9	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	14.2	
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) (Nilai)	15.7	15	15	15	14.5	14	13.5	
			Angka kesakitan (per 1.000 penduduk beresiko) (Nilai)	196	196	195	194	193	192	191	

3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan langkah-langkah yang berisi kegiatan-kegiatan dalam upaya mewujudkan indikator-indikator program tersebut.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025 - 2029, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Misi ke 2 yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Secara rinci gambaran strategi dan dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI		: PEMBANGUNAN BERKEADILAN UNTUK KABUPATEN KETAPANG MAJU DAN MANDIRI		
MISI ke 2		: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu	1	Peningkatan kunjungan K1 dan K4
			2	Peningkatan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
		1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi	1	Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
			2	Peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 1 dan KN 3
			3	Peningkatan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
		1. Optimalisasi upaya penanggulangan penurunan prevalensi stunting	1	Peningkatan nutrisi ibu saat hamil
			2	Peningkatan gizi balita
			3	Peningkatan cakupan sanitasi dasar masyarakat
			4	Peningkatan penerapan PHBS
		1. Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan masyarakat	1	Penurunan angka kesakitan penyakit menular
			2	Penurunan angka kesakitan penyakit tidak menular
			3	Peningkatan pengetahuan tentang PHBS
			4	Peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan kesehatan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, penentuan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050=5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan program prioritas yang termuat didalam RPJMD Kabupaten Ketapang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2029 terbagi dalam dua jenis, yaitu Program Penunjang dan Program Urusan Bidang Kesehatan. Secara Rinci sebagai berikut:

4.1.1 Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
5. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Sediaan Farmasu, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
11. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
12. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
13. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
14. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

15. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
16. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
17. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.1.2 Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Secara rinci rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan									
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan			Usia Harapan Hidup (tahun)				
					Jumlah kematian ibu				
					Prevalensi stunting pada balita				
					Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)				
					Angka kesakitan (per 1.000 penduduk beresiko)				
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah kematian balita	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan imunisasi bayi lengkap	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase hipertensi dalam pengendalian	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Obesitas > 18 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase lanjut usia yang mandiri	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Desa dengan Keluarga Sehat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi wasting balita	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase kecamatan dengan cakupan imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Kecamatan yang mencapai target imunisasi bayi lengkap	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Insiden HIV (per 1.000 populasi beresiko)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Proporsi penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase faskes yang dapat diakses sesuai standar waktu	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase faskes primer dengan SPA kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase cakupan JKN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Puskesmas yang mencapai akreditasi 'utama' atau lebih tinggi	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Labkesmas yang mencapai akreditasi	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase RS dengan akreditasi minimal 'utama'	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Faskes lanjutan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berkualitas	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (per 100.000 penduduk) (Nilai)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase faskes yang terpenuhi Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Rasio tenaga kesehatan terhadap populasi (per 100.000 penduduk) (Nilai)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Rasio tenaga medis terhadap populasi (per 100.000 penduduk) (Nilai)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKF dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKF dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKF dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKF dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase ketersediaan sediaan farmasi yang memenuhi standar kualitas (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase makanan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Meningkatnya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Desa mencapai target sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Persentase BABS di tempat terbuka (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah desa yang dilakukan pembudayaan pangan (Nilai)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Jumlah pasar yang dilakukan pembudayaan pangan (Nilai)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Jumlah sekolah yang dilakukan pembudayaan pangan (Nilai)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
					Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	1.02.05.2.01.0002 - Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				301.716.997.567		305.716.997.567		307.716.997.567		315.716.997.567		318.716.997.567		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				220.335.204.619		224.335.204.619		226.335.204.619		232.335.204.619		234.335.204.619		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,05	76	220.335.204.619	77	224.335.204.619	78	226.335.204.619	79	232.335.204.619	80,5	234.335.204.619	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Nilai)	91,48	92		92,5		93		93,5		94			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	7		7		7		8		7			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	7	120.000.000	7	120.000.000	7	120.000.000	8	120.000.000	7	120.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000		
1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				178.558.994.599		180.558.994.599		181.558.994.599		184.558.994.599		185.558.994.599		
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	178.558.994.599	2	180.558.994.599	2	181.558.994.599	2	184.558.994.599	2	185.558.994.599		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.423	1.698		1.756		1.810		2.200		1.756			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				178.278.994.599		180.278.994.599		181.278.994.599		184.278.994.599		185.278.994.599		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.423	1.698	178.278.994.599	1.756	180.278.994.599	1.810	181.278.994.599	2.200	184.278.994.599	1.756	185.278.994.599		
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tertindakannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000		
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tertindakannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000		
1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	16	16	310.000.000	16	310.000.000	16	310.000.000	16	310.000.000	16	310.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	24	240		240		240		240		240			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	105	360		360		360		360		360			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	4		4		3		3		3			
1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	4	30.000.000	4	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	16	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000		
1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000		
1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	105	360	30.000.000	360	30.000.000	360	30.000.000	360	30.000.000	360	30.000.000		
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	24	240	30.000.000	240	30.000.000	240	30.000.000	240	30.000.000	240	30.000.000		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				830.000.000		830.000.000		830.000.000		830.000.000		830.000.000		
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	830.000.000	1	830.000.000	1	830.000.000	1	830.000.000	1	830.000.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6		3		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		2		2		2		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	6		3		5		5		5			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	8	135.000.000	8	135.000.000	8	135.000.000	8	135.000.000	8	135.000.000		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	3	40.000.000		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	6	40.000.000	3	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6	50.000.000	3	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
1.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24	350.000.000	24	350.000.000	24	350.000.000	24	350.000.000	24	350.000.000		
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.775.000.000		2.775.000.000		2.775.000.000		2.775.000.000		2.775.000.000		
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	59	2.775.000.000	58	2.775.000.000	58	2.775.000.000	58	2.775.000.000	58	2.775.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6		6		6		6					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	51		50		50		50					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10		10		10		10					
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	51	975.000.000	50	975.000.000	50	975.000.000	50	975.000.000	50	975.000.000		
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	59	1.400.000.000	58	1.400.000.000	58	1.400.000.000	58	1.400.000.000	58	1.400.000.000		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.285.000.000		3.285.000.000		3.285.000.000		3.285.000.000		3.285.000.000		
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.285.000.000	1	3.285.000.000	1	3.285.000.000	1	3.285.000.000	1	3.285.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000		
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	140.000.000	12	140.000.000	12	140.000.000	12	140.000.000	12	140.000.000		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terperuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	72	50		50		50		50		50			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	300		300		300		300		300			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	58		58		58		58		58			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	58	300.000.000	58	300.000.000	58	300.000.000	58	300.000.000	58	300.000.000		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	72	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				33.196.210.020		35.196.210.020		36.196.210.020		39.196.210.020		40.196.210.020		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	25	25	33.196.210.020	25	35.196.210.020	25	36.196.210.020	25	39.196.210.020	25	40.196.210.020		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				33.196.210.020		35.196.210.020		36.196.210.020		39.196.210.020		40.196.210.020		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	25	25	33.196.210.020	25	35.196.210.020	25	36.196.210.020	25	39.196.210.020	25	40.196.210.020		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				66.221.792.948		66.221.792.948		66.221.792.948		68.221.792.948		69.221.792.948		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	88,5	100	66.221.792.948	100	66.221.792.948	100	66.221.792.948	100	68.221.792.948	100	69.221.792.948	1.02.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	65,5	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	74,1	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	95,8	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	99,5	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	64	100		100		100		100		100			
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	88	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	44	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah kematian balita (Orang)	135	132		130		130		125		125			
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	46		55		61		70		74			
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	43	55		58		60		65		68			
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (%)	98,2	98,5		98,8		99		99,2		99,5			
	Angka Keberhasilan pengobatan TB (%) (%)	85	90		90		90		90		90			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase hipertensi dalam pengendalian (%)	44	55		60		70		80		85			
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	64,3		65,8		66,8		77,8		78,8			
	Prevalensi Depresi pada usia 4%-% 15 tahun (%)	0	1,3		1,2		1,1		1		0,8			
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	7,98	20		25		35		50		55			
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	85	90		90		90		95		95			
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	76,1	82,7		82,9		83,1		83,5		83,8			
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	19		29		58		70		75			
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	52,94	69		82		99		100		100			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	54,16	54,16		54,16		95,8		95,8		95,8			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	79,75	86		89		92		95		95			
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	74,3	77		79		81		83		83			
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	10		10		10		10		10			
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	68,7	75		80		80		90		90			
	Persentase Desa dengan Keluarga Sehat (%)	0	18,94		28,03		37,12		49,24		61,74			
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (%)	100	100		100		100		100		100			
	Prevalensi wasting balita (%)	8,5	7,5		7		6,5		5		5			
	Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi (%)	68,6	76		79		82		85		85			
	Persentase kecamatan dengan cakupan imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90% (%)	5	12		15		18		20		22			
	Kecamatan yang mencapai target imunisasi bayi lengkap (%)	5	12		15		18		20		22			
	Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%)	43	55		58		60		65		68			
	Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (Nilai)	199	210		210		220		230		230			
	Insiden HIV (per 1.000 populasi beresiko) (Nilai)	0,18	0,22		0,23		0,24		0,24		0,24			
	Proporsi penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (%)	7,5	10		10		10		10		10			
	Persentase faskes yang dapat diakses sesuai standar waktu (%)	0	65		70		80		90		95			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase faskes primer dengan SPA kesehatan sesuai standar (%)	70	65		70		80		90		95			
	Persentase cakupan JKN (%)	98,2	98,5		98,8		99		99,2		99,5			
	Persentase Puskesmas yang mencapai akreditasi &cutama& atau lebih tinggi (%)	95,8	95,8		95,8		100		100		100			
	Persentase Labkesmas yang mencapai akreditasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase RS dengan akreditasi minimal 'utama' (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Faskes lanjutan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berkualitas (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				25.039.114.250		25.039.114.250		25.039.114.250		27.039.114.250		28.039.114.250		
Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	4	25.039.114.250	4	25.039.114.250	4	25.039.114.250	4	27.039.114.250	4	28.039.114.250		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	8	0		4		1		1		2			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	19		21		17		17		12			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	24		24		24		24		24			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	224	279		330		381		432		133			
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	168	192		299		210		220		250			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	3		3		2		2		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	19	8		6		5		8		4			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	2	2		2		3		1		1				
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	2	4		4		4		4		4				
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	1		1		1		1		0				
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	0		0		1		1		1				
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	5		4		5		4		7				
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	4		3		3		2		0				
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	0	250		250		250		250		250				
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				625.000.000		625.000.000		625.000.000		1.625.000.000		2.125.000.000			
Terpeenuhnya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	1	625.000.000	1	625.000.000	1	625.000.000	1	1.625.000.000	0	2.125.000.000			
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				625.000.000		625.000.000		625.000.000		1.625.000.000		2.125.000.000			
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	4	625.000.000	3	625.000.000	3	625.000.000	2	1.625.000.000	0	2.125.000.000			
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000			
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	19	3.500.000.000	21	3.500.000.000	17	3.500.000.000	17	3.500.000.000	12	3.500.000.000			
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				2.615.423.750		2.615.423.750		2.615.423.750		2.615.423.750		2.615.423.750			
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	0	2.615.423.750	0	2.615.423.750	1	2.615.423.750	1	2.615.423.750	1	2.615.423.750			
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000			
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	5	2.500.000.000	4	2.500.000.000	5	2.500.000.000	4	2.500.000.000	7	2.500.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
Tertindakannya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	8	0	700.000.000	4	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	2	700.000.000		
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				964.000.000		964.000.000		964.000.000		964.000.000		964.000.000		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	1	964.000.000	1	964.000.000	1	964.000.000	1	964.000.000	1	964.000.000		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	19	8	1.500.000.000	6	1.500.000.000	5	1.500.000.000	8	1.500.000.000	4	1.500.000.000		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				1.370.000.000		1.370.000.000		1.370.000.000		1.370.000.000		1.370.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	2	2	1.370.000.000	2	1.370.000.000	3	1.370.000.000	1	1.370.000.000	1	1.370.000.000		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				801.190.500		801.190.500		801.190.500		801.190.500		801.190.500		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	24	801.190.500	24	801.190.500	24	801.190.500	24	801.190.500	24	801.190.500		
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tertindakannya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	0	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	224	279	750.000.000	330	750.000.000	381	750.000.000	432	750.000.000	133	750.000.000		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				3.366.500.000		3.366.500.000		3.366.500.000		3.366.500.000		3.366.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	2	4	3.366.500.000	4	3.366.500.000	4	3.366.500.000	4	3.366.500.000	4	3.366.500.000		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				4.392.000.000		4.392.000.000		4.392.000.000		4.392.000.000		4.392.000.000		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	4	4.392.000.000	4	4.392.000.000	4	4.392.000.000	4	4.392.000.000	4	4.392.000.000		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	168	192	180.000.000	299	180.000.000	210	180.000.000	220	180.000.000	250	180.000.000		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.112.678.698		40.112.678.698		40.112.678.698		40.112.678.698		40.112.678.698		
Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	75.509	176.383	40.112.678.698	178.597	40.112.678.698	180.867	40.112.678.698	183.194	40.112.678.698	185.581	40.112.678.698		
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	38.747	41.791		42.316		42.853		43.405		43.970			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.030	10.817		10.952		11.091		11.234		11.381			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	28	28		28		28		28		28			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	8	10		10		12		12		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	82.971	82.988		84.009		85.077		86.171		87.294			
	Jumlah tanaman kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	52	70		80		90		100		30			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	11	100		150		200		250		300			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.059	419.010		424.402		429.823		435.380		441.078			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	43.147	54.513		55.197		55.899		56.618		57.356			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.567	6.763		6.845		6.832		7.021		7.112			
	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	0	1.000		1.500		2.000		2.500		3.000			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.402	1.291		1.307		1.323		1.340		1.358			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5.541	7.362		7.362		7.362		7.362		7.362			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9.873	6.370		5.653		5.107		4.686		4.375			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	14.573	12.830		12.848		12.899		12.977		13.078			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.196	1.180		1.047		946		868		810			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.402	2.000		2.500		3.000		3.500		4.000			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	178	396		396		436		480		530			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.827	11.677		11.824		11.974		12.128		12.286			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7.268	11.062		11.201		11.344		11.490		11.639			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	2	8		10		12		18		24			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	24	24		24		24		12		24			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1		1		2		3		4			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1		2		3		4		4			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	3	3		3		3		3		3				
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.827	11.677	320.000.000	11.824	320.000.000	11.974	320.000.000	12.128	320.000.000	12.286	320.000.000			
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7.268	11.062	395.000.000	11.201	395.000.000	11.344	395.000.000	11.490	395.000.000	11.639	395.000.000			
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.030	10.817	395.000.000	10.952	395.000.000	11.091	395.000.000	11.234	395.000.000	11.381	395.000.000			
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	38.747	41.791	270.000.000	42.316	270.000.000	42.853	270.000.000	43.405	270.000.000	43.970	270.000.000			
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	82.971	82.988	270.000.000	84.009	270.000.000	85.077	270.000.000	86.171	270.000.000	87.294	270.000.000			
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000			
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.059	419.010	280.000.000	424.402	280.000.000	429.823	280.000.000	435.380	280.000.000	441.078	280.000.000			
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000			
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	43.147	54.513	270.000.000	55.197	270.000.000	55.899	270.000.000	56.618	270.000.000	57.356	270.000.000			
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000			
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	75.509	176.383	260.000.000	178.597	260.000.000	180.867	260.000.000	183.194	260.000.000	185.581	260.000.000			
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000			
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.567	6.763	260.000.000	6.845	260.000.000	6.832	260.000.000	7.021	260.000.000	7.112	260.000.000			
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.402	1.291	520.000.000	1.307	520.000.000	1.323	520.000.000	1.340	520.000.000	1.358	520.000.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				520.000.000			520.000.000			520.000.000		520.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9.873	6.370	520.000.000	5.653	520.000.000	5.107	520.000.000	4.686	520.000.000	4.375	520.000.000		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				320.000.000			320.000.000			320.000.000		320.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	14.573	12.830	320.000.000	12.848	320.000.000	12.899	320.000.000	12.977	320.000.000	13.078	320.000.000		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				150.000.000			150.000.000			150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	8	10	150.000.000	10	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	14	150.000.000		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				150.000.000			150.000.000			150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				250.000.000			250.000.000			250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	33	33	250.000.000	33	250.000.000	33	250.000.000	33	250.000.000	33	250.000.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				250.000.000			250.000.000			250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	3	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				300.000.000			300.000.000			300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				150.000.000			150.000.000			150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	4	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				200.000.000			200.000.000			200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.402	2.000	250.000.000	2.500	250.000.000	3.000	250.000.000	3.500	250.000.000	4.000	250.000.000		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	11	100	300.000.000	150	300.000.000	200	300.000.000	250	300.000.000	300	300.000.000		
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1	150.000.000	2	150.000.000	3	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				27.702.678.698		27.702.678.698		27.702.678.698		27.702.678.698		27.702.678.698		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	27.702.678.698	12	27.702.678.698	12	27.702.678.698	12	27.702.678.698	12	27.702.678.698		
1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	0	1.000	100.000.000	1.500	100.000.000	2.000	100.000.000	2.500	100.000.000	3.000	100.000.000		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	52	70	155.000.000	80	155.000.000	90	155.000.000	100	155.000.000	30	155.000.000		
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	2	8	125.000.000	10	125.000.000	12	125.000.000	18	125.000.000	24	125.000.000		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	2	2.100.000.000	3	2.100.000.000	4	2.100.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	8	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	24	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	12	200.000.000	24	200.000.000		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	15	15	175.000.000	15	175.000.000	15	175.000.000	15	175.000.000	15	175.000.000		
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	28	28	275.000.000	28	275.000.000	28	275.000.000	28	275.000.000	28	275.000.000		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.196	1.180	250.000.000	1.047	250.000.000	946	250.000.000	868	250.000.000	810	250.000.000		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	178	396	200.000.000	396	200.000.000	436	200.000.000	480	200.000.000	530	200.000.000		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5.541	7.362	100.000.000	7.362	100.000.000	7.362	100.000.000	7.362	100.000.000	7.362	100.000.000		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tanaman kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	36	36	75.000.000	36	75.000.000	36	75.000.000	36	75.000.000	36	75.000.000		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		
Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	3	4	570.000.000	4	570.000.000	5	570.000.000	5	570.000.000	7	570.000.000		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Dilindakanjuti Perizinannya (Unit)	3	4		4		5		5		7			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	3	4		4		5		5		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				87.500.000		87.500.000		87.500.000		87.500.000		87.500.000		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan (Unit)	3	4	87.500.000	4	87.500.000	5	87.500.000	5	87.500.000	7	87.500.000		
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	3	4	112.500.000	4	112.500.000	5	112.500.000	5	112.500.000	7	112.500.000		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	24	24	250.000.000	24	250.000.000	24	250.000.000	24	250.000.000	24	250.000.000		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	3	4	120.000.000	4	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	7	120.000.000		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				14.440.000.000		14.440.000.000		14.440.000.000		14.440.000.000		14.440.000.000		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (per 100.000 penduduk) (Nilai)	322,2	323,5	14.440.000.000	328,9	14.440.000.000	333,1	14.440.000.000	336,9	14.440.000.000	340,3	14.440.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	50	54		58		63		67		71			
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase faskes yang terpenuhi Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai standar (%)	52	56		60		62		64		66			
	Rasio tenaga kesehatan terhadap populasi (per 100.000 penduduk) (Nilai)	383,7	385,5		391,5		395,8		399,5		402,7			
	Rasio tenaga medis terhadap populasi (per 100.000 penduduk) (Nilai)	22	24,3		27		29,5		31,7		33,9			
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Meningkatnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				100.000.000		100.000.000			100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				150.000.000		150.000.000			150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				13.500.000.000		13.500.000.000			13.500.000.000		13.500.000.000		13.500.000.000	
Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	13.500.000.000	1	13.500.000.000	1	13.500.000.000	1	13.500.000.000	1	13.500.000.000		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	559	559		559		559		559		559			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				100.000.000		100.000.000			100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				13.100.000.000		13.100.000.000			13.100.000.000		13.100.000.000		13.100.000.000	
Terperuhnya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	559	559	13.100.000.000	559	13.100.000.000	559	13.100.000.000	559	13.100.000.000	559	13.100.000.000		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				300.000.000		300.000.000			300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				690.000.000		690.000.000			690.000.000		690.000.000		690.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	268	150	690.000.000	200	690.000.000	200	690.000.000	200	690.000.000	300	690.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				690.000.000		690.000.000		690.000.000		690.000.000		690.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	268	150	690.000.000	200	690.000.000	200	690.000.000	200	690.000.000	300	690.000.000		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	25,12	40,05	400.000.000	45,02	400.000.000	50	400.000.000	55,02	400.000.000	60	400.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	74,58	77		78		79		80		81			
	Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan (%)	50	62		66		70		74		78			
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	81	82		82,5		83		83,5		84			
	Persentase ketersediaan sediaan farmasi yang memenuhi standar kualitas (%)	85	90		90		90		90		90			
	Persentase makanan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan (%)	85	90		90		90		90		90			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	65	100	100.000.000	120	100.000.000	150	100.000.000	170	100.000.000	200	100.000.000		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	65	100	100.000.000	120	100.000.000	150	100.000.000	170	100.000.000	200	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	259	300	100.000.000	350	100.000.000	380	100.000.000	400	100.000.000	425	100.000.000		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	259	300	100.000.000	350	100.000.000	380	100.000.000	400	100.000.000	425	100.000.000		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Meningkatnya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0	50	50.000.000	70	50.000.000	100	50.000.000	120	50.000.000	150	50.000.000			
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0	50	50.000.000	70	50.000.000	100	50.000.000	120	50.000.000	150	50.000.000			
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	30	50	100.000.000	70	100.000.000	100	100.000.000	120	100.000.000	150	100.000.000			
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	30	50	100.000.000	70	100.000.000	100	100.000.000	120	100.000.000	150	100.000.000			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000			
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Desa mencapai target sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (%)	7,58	18,94	320.000.000	28,03	320.000.000	37,12	320.000.000	49,24	320.000.000	61,74	320.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan		
	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (%)	20	40		60		75		90		100				
	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (%)	24	28		30		32		35		38				
	Persentase BABS di tempat terbuka (%)	10	7		5		3		1		0				
	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan pangan (Nilai)	4	6		6		6		6		6				
	Jumlah pasar yang dilakukan pemberdayaan pangan (Nilai)	0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah sekolah yang dilakukan pembudayaan pangan (Nilai)	26	20		20		20		20		20				
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000			
	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	23.831	6.000		12.000		18.000		24.000		30.000				
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000			
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	3	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000			
1.02.05.2.01.0002 - Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000			
Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	23.831	6.000	70.000.000	12.000	70.000.000	18.000	70.000.000	24.000	70.000.000	30.000	70.000.000			
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000			
Terlaksananya Pelaksanaan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	412.209	90.000	70.000.000	180.000	70.000.000	270.000	70.000.000	360.000	70.000.000	450	70.000.000			
1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000			
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	412.209	90.000	70.000.000	180.000	70.000.000	270.000	70.000.000	360.000	70.000.000	450	70.000.000			
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		

4.2 Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang memiliki dimensi politik dan teknokratik. Rumusan program prioritas Pembangunan ini yang kemudian perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program prioritas pembangunan daerah dalam dimensi politik berisi program-program politik yang bersifat unggulan serta menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan. Berikut adalah sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4. 3 Program Prioritas Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Rincian Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penurunan tingkat kematian ibu	Peningkatan derajat kesehatan perempuan secara keseluruhan dan peningkatan produktivitas masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
2	Penurunan tingkat kematian bayi	Peningkatan harapan dan kualitas hidup	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
3	Penurunan angka stunting	Peningkatan kualitas hidup anak dan berkurangnya beban	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

		social ekonomi pemerintah daerah	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
4	Pemberian imunisasi dasar kepada balita	Proses tumbuh kembang anak menjadi baik dan terhindar dari penyakit	Pengelolaan Layanan Imunisasi	
5	Penerapan BPJS Kesehatan gratis bagi seluruh keluarga miskin di Kabupaten Ketapang	Peningkatan akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat tidak mampu dan penurunan angka kemiskinan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
6	Peningkatan kualitas layanan dan penambahan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan kepuasan pasien	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
			Pengembangan Rumah Sakit	
7	Peningkatan kualitas layanan dan penambahan fasilitas Puskesmas	Peningkatan kepuasan pasien dan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan	Pembangunan Puskesmas	
			Pengembangan Puskesmas	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	
8	Penambahan jumlah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang berkualitas	Penyelenggaraan layanan kesehatan yang bermutu	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
9	Penyebaran / pemerataan tenaga kesehatan ke seluruh wilayah Kabupaten Ketapang	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan terluar, sehingga dapat mengurangi kesenjangan kesehatan antar daerah	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	

		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas 1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas 1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

			1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan sasaran dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU Perangkat Daerah Dinas Kesehatan kabupaten Ketapang.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan									
2.	Jumlah kematian ibu	Orang	11	14	14	13	13	12	12	
3.	Prevalensi stunting pada balita	%	17,9	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14,2	
4.	Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Nilai	15,7	15	15	15	14,5	14	13,5	
5.	Angka kesakitan (per 1.000 penduduk beresiko)	Nilai	196	196	195	194	193	192	191	

4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun IKD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. 5 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73.72	74.00	74.20	74.40	74.60	74.80	75.00	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	17.9	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	14.2	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	16	15.5	15.5	15.5	15	14.5	14	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	Nilai	73.72	74	74.20	74.40	74.60	74.80	75	
2	Prevalensi stunting pada balita	%	17.9	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	14.2	
3	Jumlah kematian ibu	Orang	11	14	14	13	13	12	12	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63.05	65	68	70	71	72	73	
5	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (per 100.000 penduduk)	Nilai	322.2	322.2	323.5	328.9	333.1	336.9	340.3	
6	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	88.5	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	25.12	35.07	40.05	45.02	50	55.02	60	
8	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	50	50	54	58	63	67	71	
9	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	91.48	90	92	92.5	93	93.5	94	
10	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	65.5	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	74.58	76	77	78	79	80	81	
12	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	%	50	58	62	66	70	74	78	
13	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	74.1	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
15	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95.8	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	99.5	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	81	81.5	82	82.5	83	83.5	84	
19	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	64	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	44	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
26	Jumlah kematian balita	Orang	135	132	132	130	130	125	125	
27	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	0	36	46	55	61	70	74	
28	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	43	50	55	58	60	65	68	
29	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	98.2	98.3	98.5	98.8	99	99.2	99.5	
30	Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	%	85	90	90	90	90	90	90	
31	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	44	50	55	60	70	80	85	
32	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	0	62.8	64.3	65.8	66.8	77.8	78.8	
33	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	0	1.4	1.3	1.2	1.1	1	0.8	
34	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	7.98	15	20	25	35	50	55	
35	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	

36	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	85	85	90	90	90	95	95	
37	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	76.1	80.9	82.7	82.9	83.1	83.5	83.8	
38	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	0	10	19	29	58	70	75	
39	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	52.94	59	69	82	99	100	100	
40	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	54.16	54.16	54.16	54.16	95.8	95.8	95.8	
41	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	79.75	83	86	89	92	95	95	
42	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	74.3	75	77	79	81	83	83	
43	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	0	10	10	10	10	10	10	
44	Cakupan penemuan kasus TB	%	68.7	70	75	80	80	90	90	

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. 6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Usia Harapan Hidup (tahun)	positif	Nilai	73.72	74	74.20	74.40	74.60	74.80	75	
3.	Prevalensi stunting pada balita	negatif	%	17.9	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	14.2	
4.	Jumlah kematian ibu	negatif	Orang	11	14	14	13	13	12	12	
5.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	positif	%	88.5	100	100	100	100	100	100	
6.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (per 100.000 penduduk)	positif	Nilai	322.2	322.2	323.5	328.9	333.1	336.9	340.3	
7.	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	positif	%	25.12	35.07	40.05	45.02	50	55.02	60	
8.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	63.05	65	68	70	71	72	73	
9.	Nilai IKM Perangkat Daerah	positif	Nilai	91.48	90	92	92.5	93	93.5	94	
10.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	positif	%	65.5	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	positif	%	74.58	76	77	78	79	80	81	
12.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	positif	%	50	50	54	58	63	67	71	
13.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	positif	%	74.1	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	positif	%	50	58	62	66	70	74	78	
16.	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	95.8	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	positif	%	99.5	100	100	100	100	100	100	
19.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah	positif	%	81	81.5	82	82.5	83	83.5	84	
20.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	positif	%	64	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
21.	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	88	100	100	100	100	100	100	
22.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	positif	%	44	100	100	100	100	100	100	
23.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
24.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
25.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
26.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
27.	Jumlah kematian balita	negatif	Orang	135	132	132	130	130	125	125	
28.	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	positif	%	0	36	46	55	61	70	74	
29.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	positif	%	43	50	55	58	60	65	68	
30.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	positif	%	98.2	98.3	98.5	98.8	99	99.2	99.5	
31.	Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	positif	%	85	90	90	90	90	90	90	
32.	Persentase hipertensi dalam pengendalian	positif	%	44	50	55	60	70	80	85	
33.	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	positif	%	0	62.8	64.3	65.8	66.8	77.8	78.8	
34.	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	negatif	%	0	1.4	1.3	1.2	1.1	1	0.8	
35.	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	positif	%	7.98	15	20	25	35	50	55	
36.	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	negatif	%	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	
37.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	85	85	90	90	90	95	95	
38.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	positif	%	76.1	80.9	82.7	82.9	83.1	83.5	83.8	
39.	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	positif	%	0	10	19	29	58	70	75	
40.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	positif	%	52.94	59	69	82	99	100	100	
41.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	positif	%	54.16	54.16	54.16	54.16	95.8	95.8	95.8	

42.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	positif	%	79.75	83	86	89	92	95	95	
43.	Persentase lanjut usia yang mandiri	positif	%	74.3	75	77	79	81	83	83	
44.	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	negatif	%	0	10	10	10	10	10	10	
45.	Cakupan penemuan kasus TB	positif	%	68.7	70	75	80	80	90	90	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam keselarasan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pada Dinas Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga prioritas pembangunan yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2029.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pendanaan serta komitmen semua unsur, baik internal Dinas Kesehatan maupun *stakeholders* terkait. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja serta reviu terhadap indikator kinerja. Sosialisasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 diperlukan untuk membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.